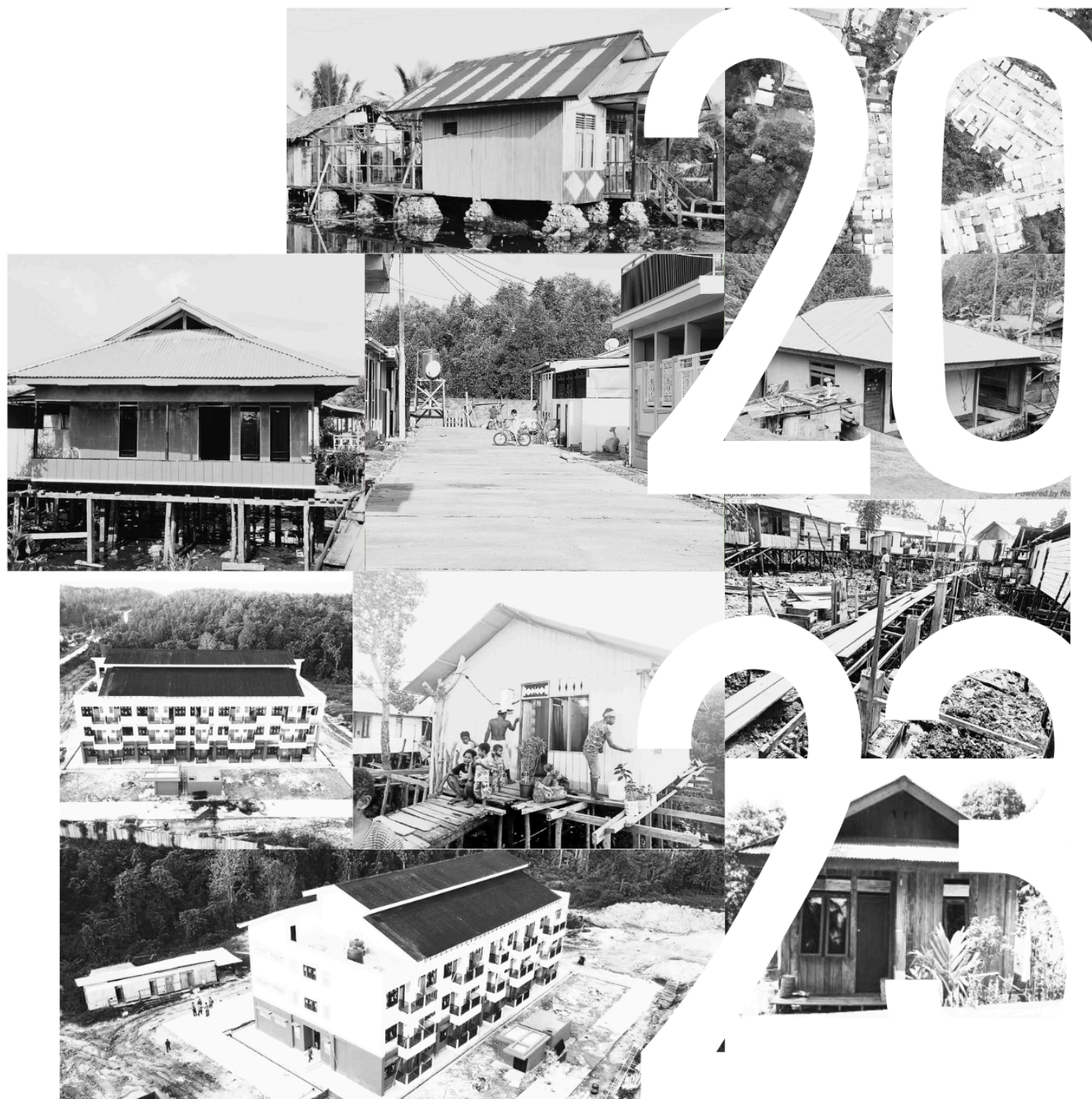


LAPORAN KINERJA

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II



BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023. Laporan Kinerja ini disusun untuk melaporkan capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dan sebagai salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan kepada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.

Melalui LAKIP Tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II menyajikan kinerjanya yang diukur dari capaian kinerja program dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 yaitu kapasitas organisasi dalam mendukung pencapaian kinerja, capaian kinerja organisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2020-2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, serta permasalahan dan tindak lanjut terkait kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023. Capaian tersebut adalah hasil kontribusi dari seluruh entitas kerja di lingkungan BP2P Papua II.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan serta menjadi bahan evaluasi untuk program pada tahun-tahun selanjutnya. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan seluruh jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dalam menyelesaikan Laporan Kinerja ini.

Manokwari, 11 Januari 2024

Kepala Balai Pelaksana
Penyediaan Perumahan Papua II



Ridwan Diba Sudartha, S.E., M.T.

NIP. 19740220 200112 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II memiliki wilayah administratif di 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai Capaian Kinerja dan Capaian Keuangan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023.

Capaian Kinerja Program

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kegiatan Penyediaan Akses Rumah yang Layak dan Aman pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) yang telah direvisi. Berdasarkan Perjanjian Kinerja, terdapat 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu: 1) Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni; dan 2) Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan. Dokumen Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II merupakan akumulasi dari target dan realisasi Satker Balai Penyediaan Perumahan Papua II dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat. Seluruh realisasi mencapai 100% yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Perencanaan Penyediaan

Laporan Perencanaan Penyediaan Perumahan telah dilaksanakan dengan capaian 100% berupa 4 laporan yaitu Laporan Sinkronisasi Program Pusat-Daerah, Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PKP, Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat.

2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya telah dilaksanakan dengan capaian 100% yaitu sejumlah 1.425 unit dari target 1425 unit. Program Peningkatan Kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dilaksanakan tersebar di 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Program BSPS terbagi menjadi 1385 unit BSPS Reguler dan 40 unit BSPS PKE kolaborasi dengan BAZNAS.

3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun

Jumlah Rumah Susun yang dibangun telah dilaksanakan dengan capaian 100% yaitu sejumlah 1 tower berjumlah 43 unit yaitu Rumah Susun Universitas Muhammadiyah Sorong (UMS) berlokasi di Kota Sorong yang merupakan paket MYC TA 2022-2023.

4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara

Jumlah Rumah Susun yang dipelihara telah dilaksanakan dengan capaian 100% yaitu sejumlah 3 tower. Paket Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun TNI AL Sorong berlokasi di Kota Sorong, Pemeliharaan, Perawatan Rumah Susun Gereja Pantekosta di Indonesia Alkitab Manokwari berlokasi di Kabupaten Manokwari, dan Pemeliharaan Rumah Susun Pondok Pesantren Hidayatullah.

5. Jumlah Rumah MBR yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU

Jumlah Rumah MBR yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU telah dilaksanakan dengan capaian 196,77% sejumlah 244 unit. Pelaksanaan pembangunan PSU untuk MBR berlokasi di Perumahan Green Valley Residence, Perumahan Sogun Permai 5, Perumahan Arfai Salak dan ketiga perumahan berlokasi di Kabupaten Manokwari.

6. Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko

Penyusunan laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko sudah tercapai dengan capaian 100% yang berjumlah 2 laporan. Laporan tersebut terdiri dari dokumen pendampingan manajemen risiko dan ZI dan pengembangan dan penerapan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.

Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan sarana dan prasarana internal telah dilaksanakan dengan capaian 100% berupa pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa peralatan dan mesin yaitu video conference, laptop, speaker, brankas, drone, lemari, hammer tes, meja dll.

2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker

Layanan dukungan manajemen satker telah dilaksanakan dengan capaian 100% berupa 2 layanan yaitu dukungan pelaksanaan pembangunan seperti pengadaan ground breaking dan peresmian (spanduk, backdrop, banner), belanja sewa (sound system, tenda, kursi, panggung), belanja perjalanan biasa (uang harian perjalanan dinas dan biaya penginapan).

3. Jumlah Layanan Perkantoran

Layanan perkantoran telah dilaksanakan dengan capaian 100% berupa belanja keperluan perkantoran, belanja honor operasional satuan kerja, belanja operasional barang lainnya, langganan listrik, sewa dll.

Capaian Anggaran

Capaian anggaran Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat memiliki nilai diatas 98% sehingga dapat dinilai sangat baik. Berdasarkan data e-monitoring, realisasi anggaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II tahun 2023 adalah sebesar Rp 7.470.015.000 atau 98,27% dari total pagu Revisi ke-3 pada bulan November 2023 yang berjumlah Rp 7.601.631.000. Rincian realisasi keuangan Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II sebesar Rp 75.084.703 atau 99,17% dari total pagu Rp 75.713.791.000.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	2
Daftar Isi.....	5
Daftar Tabel.....	7
Daftar Gambar.....	9
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 11
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Tugas dan Fungsi.....	13
1.3 Struktur Organisasi Satuan Kerja.....	14
1.4 Isu Strategis.....	17
 BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	 18
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis.....	19
2.2 Perjanjian Kinerja.....	20
2.3 Metode Pengukuran.....	25
2.4 Target Tahun 2023 Menurut Rencana Strategis 2020-2024.....	26
 BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI.....	 28
3.1 Sumber Daya Manusia.....	29
3.2 Sarana dan Prasarana.....	33
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).....	37
 BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA.....	 40
4.1 Capaian Kinerja Satuan Kerja.....	41
4.2 Perbandingan Kinerja Satuan Kerja.....	55
4.3 Realisasi Anggaran.....	58
 BAB 5 PENUTUP.....	 61
5.1. Rangkuman Capaian.....	62
5.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut.....	63
 LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA.....	 65
LAMPIRAN 2 BA KESEPAKATAN CAPAIAN OUTPUT.....	66
LAMPIRAN 3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA).....	67
LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI KEGIATAN.....	68

Daftar Tabel

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.1 Target Capaian Pembangunan Perumahan menurut Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2020 - 2024.....	19
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Akhir Tahun 2023.....	20
Tabel 2.3 Perbandingan Perubahan Target Kinerja Awal dan Revisi Akhir pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	23
Tabel 2.4 Kategori Penilaian.....	24
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023....	25
Tabel 2.6 Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024.....	26

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI

Tabel 3.1. Daftar Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.....	30
Tabel 3.2. Daftar Sarana dan Prasarana di Satker Balai Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023.....	33
Tabel 3.3. Daftar Sarana dan Prasarana di Satker Balai Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2021 - 2023.....	33
Tabel 3.5. Daftar Rekapitulasi Sarana dan Prasarana di Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat.....	35
Tabel 3.6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA. 2023.....	36
Tabel 3.7 Revisi Anggaran Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II..	37
Tabel 3.8 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Akhir Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat TA. 2023.....	37
Tabel 3.9 Revisi Anggaran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat.....	38

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 4.1 Realisasi Berdasarkan Capaian Kinerja BP2P Papua II TA. 2023.....	40
Tabel 4.2 Realisasi Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan Tahun 2023.....	41
Tabel 4.3 Realisasi Jumlah Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya TA.2023.....	43
Tabel 4.4 Sebaran Lokasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Tahun 2023.....	44
Tabel 4.5 Realisasi Jumlah Rumah Susun yang dibangun Tahun 2023.....	45
Tabel 4.6 Rincian Alokasi Pembangunan Rumah Susun Tahun 2023.....	45
Tabel 4.7 Realisasi Jumlah Rumah Susun yang dipelihara Tahun 2023.....	46

Tabel 4.8 Rincian Alokasi Pemeliharaan Rumah Susun Tahun 2023.....	46
Tabel 4.9 Realisasi Jumlah MBR yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU Tahun 2023..	47
Tabel 4.10 Rincian Alokasi jumlah MBR yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU Tahun 2023.....	47
Tabel 4.11 Realisasi Pembinaan dan Pengembangan KI dan MR Tahun 2023.....	48
Tabel 4.12 Realisasi Layanan Sarana dan Prasarana Internal Tahun 2023.....	49
Tabel 4.13 Realisasi Layanan Dukungan Manajemen Satker Tahun 2023.....	49
Tabel 4.14 Realisasi Layanan Perkantoran 2023.....	50
Tabel 4.15 Rekap Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.....	51
Tabel 4.16 Rekap Capaian Kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat.....	52
Tabel 4.17 Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dan 2023.....	54
Tabel 4.18 Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dan 2023.....	56
Tabel 4.19 Perbandingan Realisasi Kinerja antar-wilayah.....	56
Tabel 4.20 Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023.....	57
Tabel 4.21 Realisasi Anggaran Kegiatan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2023.....	59

BAB 5 PENUTUP

Tabel 5.1 Permasalahan dan Tindak Lanjut.....	62
---	----

Daftar Gambar

BAB 1 PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.....	14
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat..	15

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA..... 17

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023.....	21
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023.....	22

BAB 3 KAPASITAS ORGANISASI.....27

Gambar 3.1. Jumlah Pegawai di BP2P Papua II.....	28
Gambar 3.2. Diagram Daftar Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA. 2023.....	29
Gambar 3.3. Daftar Pegawai BP2P Papua II sesuai Gender.....	30

BAB 4 AKUNTABILITAS KINERJA.....39

Gambar 4.1 Kegiatan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat Daerah TA. 2023 Tahap I.....	42
Gambar 4.2 Kegiatan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat Daerah TA. 2023 Tahap II.....	42
Gambar 4.3 Rapat Koordinasi II Finalisasi Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya TA. 2023.....	43
Gambar 4.4 Sebaran Alokasi BSPS TA. 2023.....	44
Gambar 4.5 Pendampingan Pengembangan Penerapan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.....	48
Gambar 4.6 Perbandingan Capaian pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023.....	55
Gambar 4.7 Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan TA. 2023 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.....	57
Gambar 4.8 Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan TA. 2023 Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat.....	58

BAB 1

PENDAHULUAN



Pada BAB Pendahuluan akan dijabarkan mengenai latar belakang disusunnya Laporan Kinerja, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, dan Isu Strategis pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan sebuah dokumen yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II disusun berdasarkan target dan capaian selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan. Laporan ini juga disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan dan Perjanjian Kinerja tahun 2023.

Sebagai pedoman penyusunan laporan kinerja yang akuntabel, dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II tahun 2023 antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024.
11. SE Inspektur Jenderal No 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi AKIP di Tingkat Unit Organisasi di Kementerian PUPR

Laporan Kinerja ini merupakan pelaporan atas pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Pada akhir tahun 2023 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 7.601.631.000 dan Rp 75.713.791.000 melalui Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat. Hal tersebut didukung dengan adanya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Perumahan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor Nomor: 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada bagian keempat. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II mempunyai garis koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam hal ini bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perumahan melalui Direktorat Teknis terkait.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dipimpin oleh seorang Kepala Balai. Periode awal tahun 2023 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dipimpin oleh Bapak Yance Pabisa periode bulan Januari - Juni. Sedangkan pada periode Bulan Juli - Sekarang dipimpin oleh Bapak Ridwan Dibya Sudartha. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II didampingi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut.

Tugas

Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II yang dinaungi oleh Direktorat Jenderal Perumahan merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024. Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II secara umum antara lain;

1. Menyelenggarakan Program Perumahan dan Kawasan Perumahan dengan menyediakan Akses Rumah Layak Huni yang bertujuan untuk Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni

2. Menyelenggarakan Program Dukungan Manajemen Perumahan yang bertujuan untuk Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II menyelenggarakan fungsi, diantaranya:

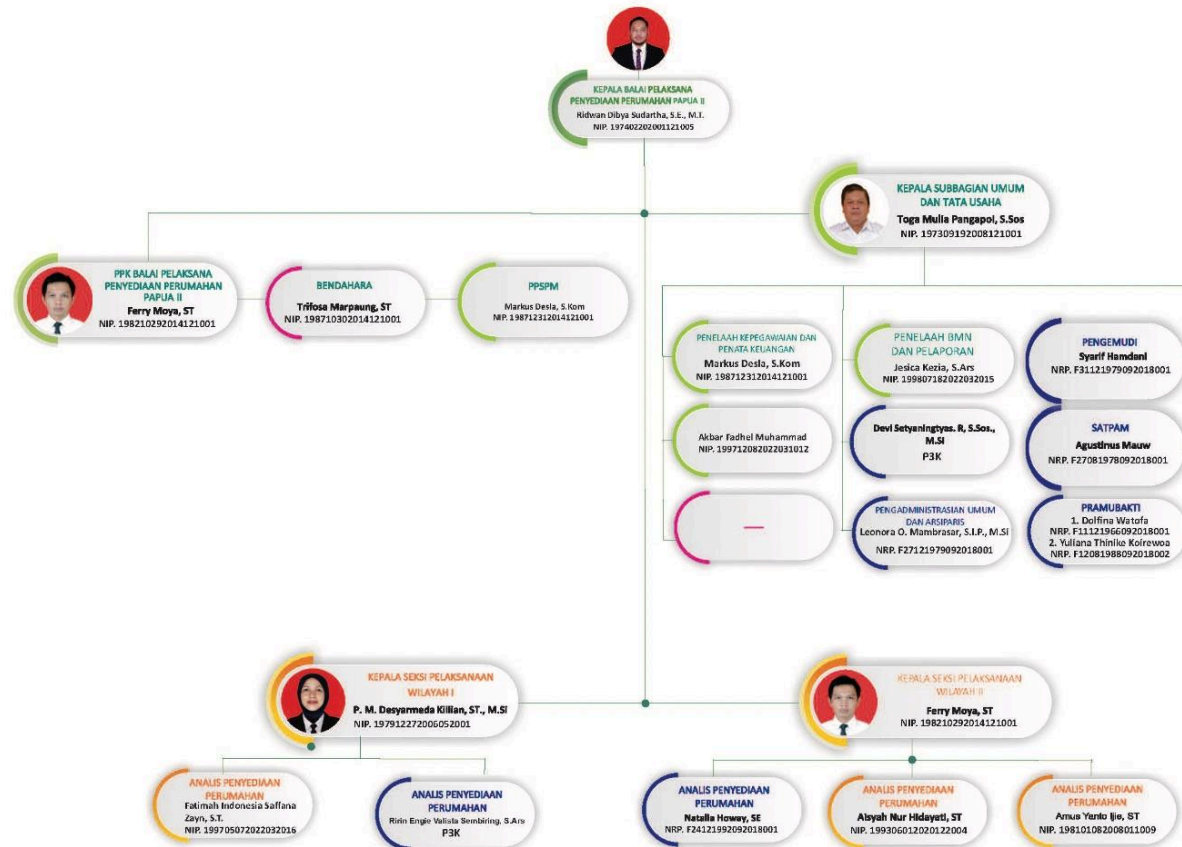
1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
2. Penyusunan rencana teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
3. Pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
4. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
6. Pengelolaan data dan informasi pelaksanaan pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, serta prasarana, sarana, dan utilitas umum;
7. Koordinasi dan dukungan penanggulangan pasca bencana;
8. Koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset; dan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

1.3 Struktur Organisasi Satuan Kerja

Berikut adalah Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II disertai dengan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat dalam upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan perumahan.

STRUKTUR ORGANISASI

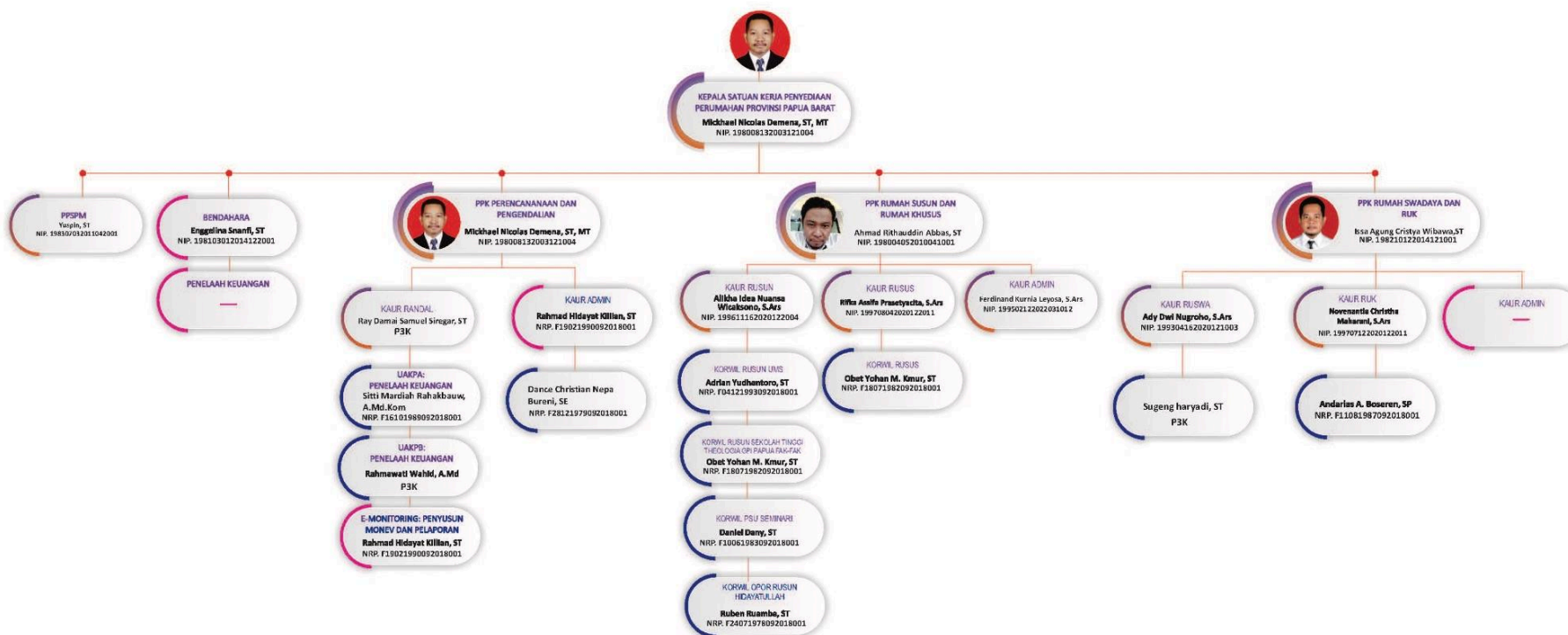
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

STRUKTUR ORGANISASI

SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA BARAT



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat

1.4 Isu Strategis

Isu Strategis adalah informasi atas kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan/atau perumusan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi pembangunan dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan perumahan khususnya di masa yang akan datang.

Wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II adalah pada Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang terdiri dari 12 Kabupaten dan 1 Kota. Isu Strategis yang dihadapi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data dan informasi serta evaluasi kinerja penyediaan perumahan Provinsi Papua Barat;
2. Tingginya angka *backlog* di Indonesia berdasarkan konsep kepemilikan.
3. Tingginya jumlah keluarga yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kawasan Kumuh pada masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan daerah 3T (pulau terluar, terpencil dan tertinggal) dan atau kawasan cagar budaya;
4. Ketersediaan lahan baik itu perkotaan maupun di daerah yang didominasi oleh Hak Ulayat (Hak Adat);
5. Basis Data Perumahan di Provinsi Papua Barat yang kurang memadai;
6. Kurangnya kepedulian Pemerintah Daerah dalam menyusun RP3KP;
7. Serah Terima Aset yang belum optimal;
8. Alokasi dana yang diberikan sangat minim tidak sebanding dengan unit organisasi yang lain, sementara usulan usulan dari kabupaten / kota sangat banyak.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



Pada BAB Perencanaan Kinerja ini akan dijabarkan mengenai uraian singkat Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Metode Pengukuran, dan Target Tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis 2020 - 2024.

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Nasional tahun 2020-2024, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II menjabarkan visi tersebut kedalam Rencana Strategis sesuai dengan peran, tugas, dan fungsinya. Pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II merupakan aksi nyata yang meliputi berbagai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung capaian program dan kegiatan. Berbagai perencanaan disusun sedemikian rupa sehingga memiliki hubungan yang sejalan dengan pelaksanaan kegiatan Unit Organisasi yang dinaunginya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perumahan.

Sejalan dengan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 dan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yaitu “Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hunian Layak melalui Penyediaan Rumah Layak Huni secara Kolaboratif”, berikut adalah sasaran strategis pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II berdasarkan Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2020 - 2024:

1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data dan informasi serta evaluasi kinerja penyediaan perumahan di Provinsi Papua Barat;
2. Meningkatkan ketersediaan Rumah Layak Huni melalui pembangunan Rumah Susun;
3. Meningkatkan ketersediaan Rumah Layak Huni melalui pembangunan Rumah Khusus;
4. Meningkatkan ketersediaan Rumah Layak Huni melalui fasilitasi dan stimulasi perumahan swadaya bagi MBR;
5. Meningkatkan ketersediaan Rumah Layak Huni melalui pembangunan PSU Rumah Umum; dan
6. Meningkatkan dukungan manajemen koordinasi, pengaturan, serta pembinaan di bidang umum dan pengelolaan administrasi, manajemen dan pengendalian risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.

Target kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II pada tahun 2020 - 2024 yaitu berkontribusi terhadap pemenuhan Rumah Layak Huni melalui:

1. Pembangunan Rumah Susun 1.418 unit
2. Pembangunan Rumah Khusus 1.285 unit
3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 23.300 unit
4. Bantuan Prasarana Sarana dan Utilitas pada Rumah Umum sebanyak 1.800 unit

Tabel 2.1 Target Capaian Pembangunan Perumahan menurut Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2020 - 2024

No	Output	Indikator Output	Satuan	Target					Total
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pembangunan Rumah Susun	Pembangunan baru	Unit	88	182	226	260	308	1.064
		Rehab	Unit	80	44	58	84	88	354
2	Pembangunan Rumah Khusus	Pembangunan baru	Unit	74	111	250	300	350	1.085
		Rehab	Unit	0	50	50	50	50	200
3	Bantuan Stimulan Rumah Swadaya	Jumlah BSPS	Unit	5.510	3.000	4.500	4.700	5.000	22.710
		Jumlah KSPN	Unit	0	140	150	150	150	590
4	PSU Rumah Umum	Jumlah Rumah MBR	Unit	-	300	400	500	600	1.800

Sumber: Renstra Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan papua II Tahun 2020 - 2024

Rencana Strategis ini disusun untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) untuk meningkatkan kepastian bermukim dan kualitas hidup masyarakat. Dengan adanya Renstra yang memadai, diharapkan adanya penerapan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pemenuhan hunian yang layak.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Direktorat Jenderal Perumahan untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dimuat dalam suatu pernyataan tertulis yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja (Permen PAN-RB No. 53/2014). Dalam hal ini Perjanjian Kinerja (PK) merupakan perjanjian yang berisikan antara pihak yang diberikan tanggung jawab (Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II) dengan pihak yang memberikan tanggung jawab (Direktur Jenderal Perumahan). Dokumen ini menjadi indikator kinerja yang perlu dipenuhi oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II selama satu tahun.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Tujuan penetapan kinerja adalah: 1) sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 2) tolak ukur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan; 3) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan 4) sebagai dasar pemberian penghargaan dan atau sanksi (*reward and punishment*). Kegiatan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II 2020 - 2024 sesuai dengan nama kegiatan yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR 2020 - 2024 yaitu:

1. Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman dengan sasaran kegiatan Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni; dan
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan dengan sasaran kegiatan Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan.

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Sesuai Perjanjian Akhir Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman				
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan	4	Laporan
		2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1425	Unit
		3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	43	Unit
		4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	3	Tower
		5. Jumlah Rumah khusus yang dibangun	—	Unit
		6. Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	—	Unit
		7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat Fasilitas layanan bantuan PSU	244	Unit
		8. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	2	Laporan
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan
		2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2	Layanan
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	2	Layanan

Pada tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II menyusun Perjanjian Kinerja sebanyak 2 (dua) kali yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Awal dan Akhir. Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II disusun pada Bulan Januari 2023 dengan mengacu pada indikator di dalam Rencana Strategis 2020 - 2024. Berikut terlampir Perjanjian Kinerja Awal pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Yance Pabisa**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2023

Pihak Kedua


Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Pihak Pertama


Yance Pabisa
NIP. 19650412 199703 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	2.000 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	43 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	1 Tower
	5 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	- Unit
	6 Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit
	7 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	350 Unit
2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan

Kegiatan:

1. Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman

- a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II
- b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat

2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

- a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II
- b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat

Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat

Anggaran	
Rp	90.961.728.000
Rp	2.037.900.000
Rp	88.923.828.000
Rp	3.950.000.000
Rp	2.600.000.000
Rp	1.350.000.000
Rp	4.637.900.000
Rp	90.273.828.000
Total Rp	94.911.728.000

Jakarta, Januari 2023

Direktur Jenderal Perumahan


Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II


Yance Pabisa
NIP. 19650412 199703 1 009

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023

Pada akhir Tahun Anggaran 2023 terdapat penyusunan Perjanjian Kinerja Akhir di Bulan Desember 2023 untuk menyesuaikan perubahan anggaran pada DIPA Revisi akhir sebagai berikut:

REVISI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ridwan Dibya Sudartha**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Jakarta, 22 Desember 2023

Pihak Pertama



Ridwan Dibya Sudartha
NIP. 19740220 200112 1 005

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatkan Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1.425 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	43 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	3 Tower
	5 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	- Unit
	6 Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit
	7 Jumlah Rumah MDR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSI	124 Unit
	8 Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan
2 Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan

Kegiatan:

1. Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman

a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Rp 77.900.247.000

b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat Rp 3.913.456.000

2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Rp 73.986.791.000

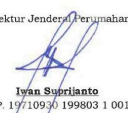
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat Rp 5.415.175.000

Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Rp 3.688.175.000

Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat Rp 1.727.000.000

Total Rp 83.315.422.000

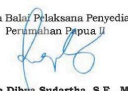
Direktur Jenderal Perumahan



Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Jakarta, 22 Desember 2023

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II



Ridwan Dibya Sudartha, S.E., M. T.
NIP. 19740220 200112 1 005

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja Akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023

Tabel 2.3 Perbandingan Perubahan Target Kinerja Awal dan Revisi Akhir
pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA	
				AWAL	REVISI
Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman					
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan	Laporan	4	4
		2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	2000	1425
		3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	43	43
		4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	1	3
		5. Jumlah Rumah khusus yang dibangun	Unit	—	—
		6. Jumlah Rumah khusus yang dipelihara	Unit	—	—
		7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat Fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	350	244
		8. Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Laporan	—	2
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan					
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1
		2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	2	2
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2	3

Sumber: Perjanjian Kinerja, 2023

Tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap Perjanjian Kinerja awal dan revisi. Penyesuaian tersebut berpengaruh terhadap jumlah unit rumah dan targetnya sebagai berikut: 1) Jumlah bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya yang semula targetnya 2000 unit, menjadi 1425 unit; 2) Jumlah rumah susun yang dibangun tetap berjumlah 43 unit; 3) Jumlah rumah susun yang dipelihara semula berjumlah 1 tower, menjadi 3 tower; Jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU semula 350 unit menjadi 124 unit. Terdapat penambahan indikator kinerja pada PK revisi yaitu terkait dengan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko sesuai amanat dari Direktorat Kepatuhan Intern.

2.3 Metode Pengukuran

Metode pengukuran kegiatan merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran program yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan memfokuskan indikator kinerja yang dimiliki oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II seperti pada Tabel 2.3 Pengukuran pencapaian sasaran kegiatan difungsikan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pada pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai sasaran kegiatan digunakan metode pengukuran untuk menilai keberhasilan suatu target. Metode pengukuran tersebut mengacu pada masing-masing target indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II tahun 2023 dengan rumusan sebagai berikut:

$$\% \text{ Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Persentase capaian target kemudian dinilai berdasarkan kategori yang ditetapkan Permen PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Kategori Penilaian

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat memuaskan
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber: Tabel Kriteria Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Persentase pencapaian target kemudian dinilai berdasarkan kategori penilaian pada Tabel 2.4. Pencapaian target dihitung berdasarkan indikator kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 yaitu: 1) Program penyediaan akses perumahan yang layak dan aman; dan 2) Program dukungan manajemen penyelenggaraan perumahan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja
--------------------------	-------------------

Program Penyediaan Akses Perumahan Yang Layak Dan Aman	1. Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan 2. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Rumah Swadaya 3. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Rumah Susun 4. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Rumah Susun 5. Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Rumah Layak Huni Rumah Khusus 6. Jumlah Rumah MBR Yang Mendapatkan Bantuan PSU
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	1. Jumlah Pemenuhan Layanan Sarana Dan Prasarana Internal 2. Jumlah Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker 3. Jumlah Pemenuhan Layanan Perkantoran

Sumber: Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2022

2.4 Target Tahun 2023 Menurut Rencana Strategis 2020-2024

Terdapat 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II yang sesuai dengan Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II pada Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu: 1) Menyediakan 1.592 unit rumah melalui pembangunan 43 unit Rumah Susun, 3 Tower Rumah Susun yang dipelihara, dan 1425 unit penanganan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; 2) Menyediakan PSU Rumah MBR sebanyak 124 unit.
2. Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan untuk meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan.

Berikut adalah perbandingan Target Renstra 2020 - 2024 dan Target 2023 yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020-2024	TARGET PK 2023
Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman				

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2020-2024	TARGET PK 2023
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan	4 Laporan	4 Laporan
		2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	22.710 Unit	1425 Unit
		3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	260 Unit	43 Unit
		4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	84 Unit	3 Tower
		5. Jumlah Rumah khusus yang dibangun	300 Unit	- Unit
		6. Jumlah Rumah khusus yang dibangun	50 Unit	- Unit
		7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat Fasilitas layanan bantuan PSU	500 Unit	124 Unit
		8. Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	- Laporan	2 Laporan
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	4 Layanan	1 Layanan
		2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	4 Layanan	2 Layanan
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	4 Layanan	2 Layanan

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa target kegiatan yang berbeda antara yang ditetapkan pada Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja Akhir Tahun 2023. Hal ini dikarenakan dengan adanya penyesuaian adanya perubahan DIPA pada masing-masing Satuan Kerja.

BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI

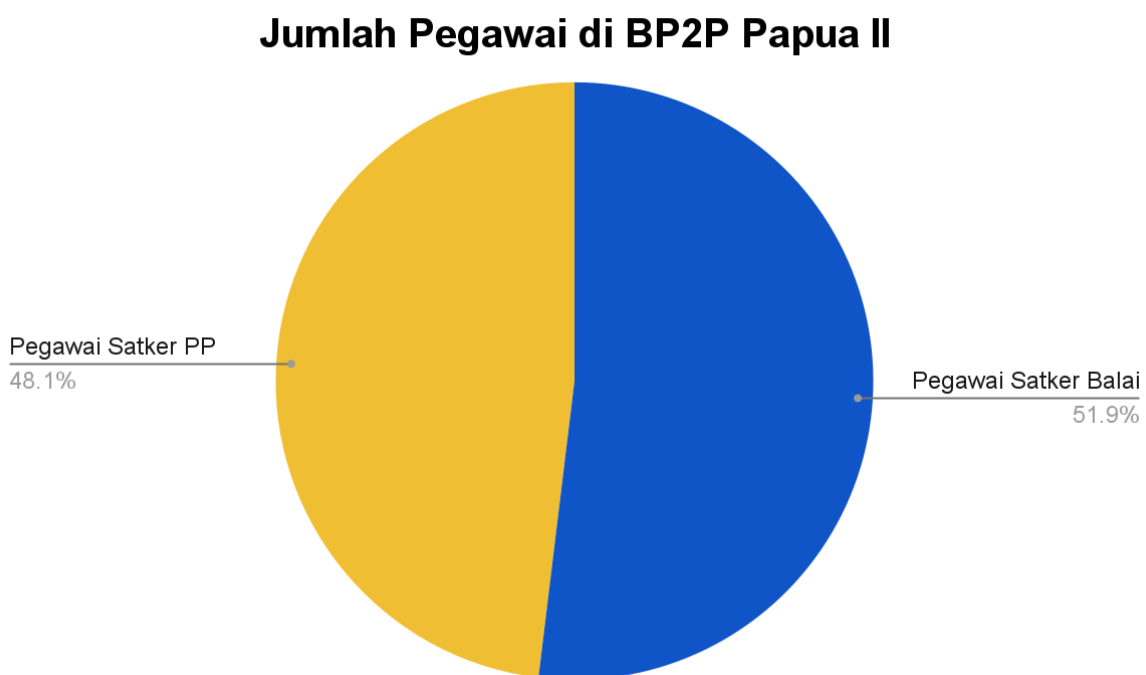


Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai salah satu instansi pemerintah, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II memiliki kapasitas organisasi yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan Anggaran yang dikelola.

3.1 Sumber Daya Manusia

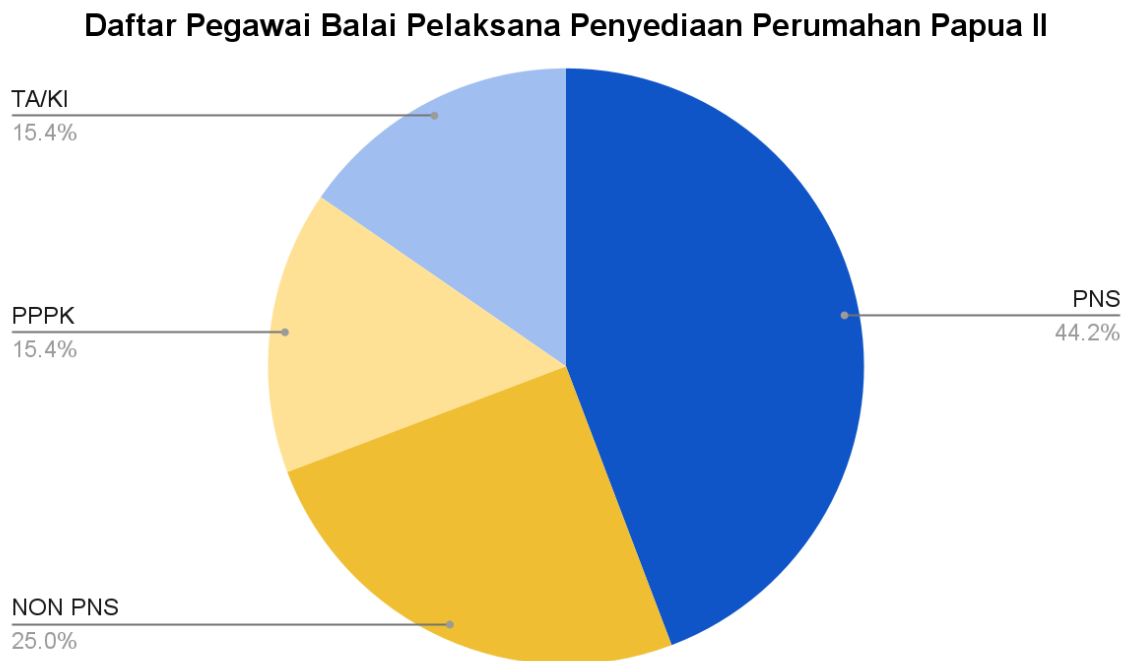
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam upaya mencapai tujuan sebuah organisasi/lembaga. Dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II didukung dengan SDM yang terdiri dari Kepala Balai, Kepala Seksi, Kasubag TU, Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen, Perbendaharaan, Kepala Urusan Teknis, Kepala Urusan Administrasi dan Data, KI, dan TA.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II memiliki pegawai berjumlah 52 orang dengan status PNS, Non PNS, PPPK, Tenaga Ahli (TA), dan Konsultan Individu (KI). Balai Penyediaan Perumahan Papua II tidak memiliki pegawai dengan status CPNS. Secara keseluruhan, jumlah pegawai di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II tersebar pada Satker Balai berjumlah 27 orang, dan Satker PP berjumlah 25 orang yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Jumlah Pegawai di BP2P Papua II

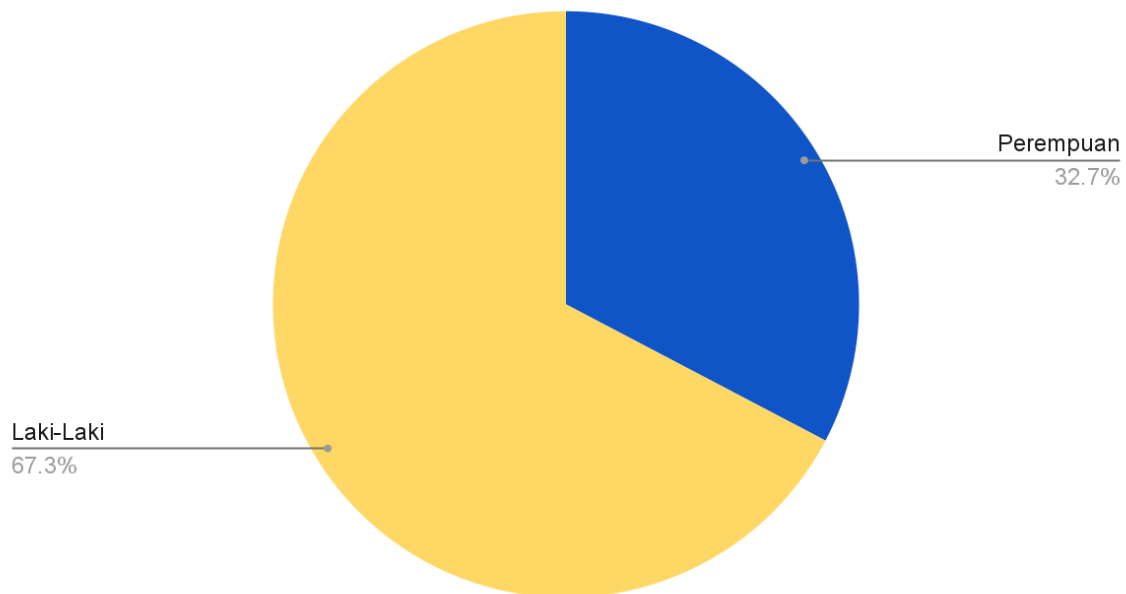
Jumlah pegawai dengan status PNS adalah 23 orang, pegawai dengan status Non PNS adalah 13 orang, PPPK berjumlah 8 orang dan pegawai dengan status TA/KI berjumlah 8 orang. Persentase pegawai PNS lebih besar dibanding pegawai Non PNS yang ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Diagram Daftar Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA. 2023

Apabila dilihat dari status gender, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II memiliki jumlah laki-laki lebih besar dibanding perempuan seperti yang ditunjukkan diagram pada Gambar 3.3. Pegawai laki-laki di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II berjumlah 25 orang, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 17 orang.

Daftar Pegawai sesuai Gender



Gambar 3.3. Daftar Pegawai BP2P Papua II sesuai Gender

Pada pertengahan TA. 2023, terdapat beberapa perubahan terhadap jumlah SDM pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II yaitu: 1) Penambahan jumlah PNS sejumlah 3 orang dikarenakan SK penempatan terhadap PNS tahun 2022; 2) Penambahan PPK berjumlah 8 orang; dan pengurangan PNS sejumlah 3 orang karena mutasi dan 1 orang sedang melaksanakan tugas belajar. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II terdiri dari beberapa jabatan fungsional yaitu: 1) Teknik Tata Bangunan dan Perumahan; 2) Ahli Pertama Arsiparis; 3) dan Ahli Pertama Penata Kelola Perumahan. Secara detail daftar pegawai pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dijabarkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Daftar Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

NO	NAMA	NIP/NRP/KTP	JABATAN
1	Ridwan Dibya Sudartha, S.E., M.T.	197402202001121005	Kepala Balai
2	Toga Mulia Pangapoi, S.Sos	197309192008121001	Kasubag Umum & TU
3	P. M. Desyarmeda Killian, ST, M.Si	197912272006052001	Kepala Seksi Pelaksana Wilayah I
4	Ferry Moya, ST	198210292014121001	Kepala Seksi Pelaksana Wilayah II
5	Michael Nicolas Demena, ST, MT	198008132003121004	Kepala Satuan Kerja
6	Issa Agung Cristya Wibawa, ST	198210122014121001	PPK Rumah Swadaya dan RUK
7	Markus Desla, S.Kom	198712312014121001	PPSPM Balai P2P Papua II
8	Enggelina Snanfi, ST	19810301201412200	Bendahara Pengeluaran Satker PnP Papua

NO	NAMA	NIP/NRP/KTP	JABATAN
		1	Barat
9	Trifosa Marpaung, ST	19871030201412100 1	Bendahara Pengeluaran Balai P2P Papua II
10	Ahmad Rithauddin Abbas, ST	19800405201004100 1	PPK Rumah Susun dan Khusus
11	Yuspin, ST	19830703201104200 1	PPSPM Satker PnP Papua Barat
12	Rustamaji, SH	19741208200412100 2	Staf Pengelola
13	Yosia Ronald, SE	19891113201412100 1	Staf Pengelola
14	Amus Yanto Ijje, ST	19810108200801100 9	Staf Pengelola
15	Ady Dwi Nugroho, S.Ars	19930416202012100 3	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
16	Rifka Assifa Prasetyacita, S.Ars	19970804202012201 1	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
17	Novenantia Christha Maharani, S.Ars	19970712202012201 1	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
18	Amalina Budiati, ST	19950105202012200 7	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
19	Alikha Idea Nuansa Wicaksono, S.Ars	19961116202012200 4	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
20	Aisyah Nur Hidayati, ST	19930601202012200 4	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
21	Fatimah Indonesia Saffana Zayn, S.T.	19970507202203201 6	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
22	Ferdinand Kurnia Leyosa, S.Ars	19950214202203101 2	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
23	Akbar Fadhel Muhammad, S.Ars.	19971208202203101 2	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama
24	Andarias A. Boseran, SP	F1108198709201800 1	Penyusun Monev dan Pelaporan
25	Dance Christian Nepa Bureni, SE	F2812197909201800 1	Penelaah Keuangan
26	Daniel Dany, ST	F1006198309201800 1	Pelaksana Teknik
27	Leonora O. Mambrasar, S.I.P., M.Si	F2712197909201800 1	Penelaah Pengadaan Barang dan Jasa
28	Natalia Howay, SE	F2412199209201800 1	Penelaah Keuangan
29	Obet Yohan M. Kmur, ST	F1807198209201800 1	Pelaksana Teknik
30	Rahmad Hidayat Killian, ST	F1902199009201800 1	Pelaksana Teknik
31	Ruben Ruamba, ST	F2407197809201800 1	Pelaksana Teknik

NO	NAMA	NIP/NRP/KTP	JABATAN
32	Sitti Mardiah Rahakbauw, A.Md.Kom	F1610198909201800 1	Penata Keuangan
33	Yuliana Thinike Koirewoa	F1208198809201800 2	Pramubakti
34	Dolfina Watofa	F1112196609201800 1	Pramubakti
35	Agustinus Mauw	F2708197809201800 1	Petugas Keamanan
36	Syarif Hamdani	F3112197909201800 1	Pengemudi
37	Adrian Yudhantoro, ST	NIK belum keluar	Ahli Pertama: Penata Kelola Perumahan
38	Devi Setyaningtyas. R, S.Sos., M.Si	19800412202321201 8	Ahli Pertama: Arsiparis
39	Rahmawati Wahid, A.Md	19910210202321204 3	Ahli Pertama: Arsiparis
40	Sugiarto Massolo,ST	NIK belum keluar	Ahli Pertama: Penata Kelola Perumahan
41	Ray Damai Samuel Siregar, ST	19950509202321101 9	Ahli Pertama: Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
42	Bert Erwin Sembor,ST	NIK belum keluar	Ahli Pertama: Penata Kelola Perumahan
43	Ririn Engie Valista Sembiring, S.Ars	19940519202321204 7	Ahli Pertama: Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
44	Sugeng Hariyadi, S. T.	19840620202321101 7	Ahli Pertama: Teknik Tata Bangunan dan Perumahan
45	Kukuh Sungkawa,ST,MT,MP	3204322401680003	Tenaga Ahli Perencanaan Perumahan RP3KP
46	Zainudin M.Z. Zainal,S.Kom	3313162309870002	Tenaga Ahli Kelembagaan RP3KP
47	Muhammad Fachrul Bachmid, ST	9202121304960003	Konsultan Individu Sinkronisasi Program
48	Budiono, SE	1271162805720002	Konsultan Individu
49	Mirdan Umbu, ST	9202121206830009	Konsultan Individu
50	Rino Razali, S.IP	1471081903860001	Konsultan Individu
51	Sutrisno Dalwis S.Kurama, ST	9202120209930001	Konsultan Individu
52	Meirio Aulio Melkisedekh Demena, S.T.	9171033005930001	Konsultan Individu PSU RUK

3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai pada suatu organisasi. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II telah Melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana berupa *loud speaker*, *video conference*, dan laptop. Rincian nilai perolehan Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023 sebesar Rp 767.982.590,00. Tabel 3.2 adalah daftar sarana dan prasarana di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II pada tahun 2023. Tabel

3.3 adalah daftar sarana dan prasarana di Balai Penyediaan Perumahan Papua II pada tahun 2021 - 2023. Pada tahun 2023 tidak ada sarana dan prasarana pada Satker Penyediaan Perumahan Papua II. Tabel 3.4 adalah daftar rekapitulasi sarana dan prasarana di Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat sampai dengan tahun 2023.

Tabel 3.2. Daftar Sarana dan Prasarana di Satker Balai Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023

No	Kode Barang	Jenis Barang	Nilai Perolehan	Keterangan
1	3.05.02.06.007	Loudspeaker	12.677.663,00	Baik
2	3.06.01.02.132	Video Conference	23.410.000,00	Baik
3	3.10.01.02.002	Laptop	24.782.970,00	Baik
4	3.10.01.02.003	Laptop	17.999.760,00	Baik
5	3.10.01.02.004	Laptop	17.211.660,00	Baik
6	3.10.01.02.005	Laptop	72.500.000,00	Baik
7	3.10.01.02.006	Laptop	40.000.000,00	Baik
8	96.539.808.4-416.000	Laser Projector	52.181.269,00	Baik
9	96.539.808.4-416.000	Kursi kerja	124.241.100,00	Baik
10	96.539.808.4-416.000	Dry box cabinet	14.289.137,00	Baik
11	02.146.223.8-015.000	Meja kantor	154.949.225,00	Baik
12	02.146.223.8-015.000	Hammer test	22.380.305,00	Baik
13	02.146.223.8-015.000	Meteran laser	3.730.051,00	Baik
14	02.808.733.6-023.000	Loker	187.629.450,00	Baik
Total			767,982,590	

Sumber: Barang Milik Negara Balai Penyediaan Perumahan Papua II, 2023

Tabel 3.3. Daftar Sarana dan Prasarana di Satker Balai Penyediaan Perumahan Papua II
Tahun 2021 - 2023

No	Kode Barang	Jenis Barang	Merk/ Tipe	Kuan tita	Tahun	Nilai Perolehan	Ket
1	3.10.01.02.002	Laptop	Asus Rog Strix	2	2021	40.700.000,00	Baik
2	3.10.01.02.003	Laptop	Msi Modern 14 B10mw	1	2021	9.835.248,00	Baik
3	3.10.01.02.001	P.C Unit	Aspire C22-963 All In	1	2021	8.800.000,00	Baik
4	3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	Kursi Hadap Indachi	7	2021	9.800.000,00	Baik
5	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Meja Vino Mt-120	7	2021	5.460.000,00	Baik
6	3.05.02.01.008	Meja Rapat	Meja Gallant Mko-120	1	2021	6.740.000,00	Baik
7	3.06.01.02.167	Drone	Drone Mavic Air 2 Combo	1	2021	17.889.791,00	Baik
8	3.06.01.01.036	Microphone/ Wireless Mic	Saramonic Blink 500 B2	1	2022	2.992.560,00	Baik
9	3.06.01.02.128	Camera Digital	Sony Alpha 6000	1	2022	13.296.690,00	Baik
10	3.06.01.02.167	Drone	Drone Dji Mini Fly More Combo	1	2022	14.950.360,00	Baik
11	3.10.01.02.002	Laptop	Asus Zenbook Ux5401e + Os Windows	3	2022	59.994.390,00	Baik
12	3.10.01.02.003	Laptop	Dell Precision 5570-002	2	2022	112.500.000,00	Baik
13	3.05.02.06.007	Loudspeaker	JBL Partybox 310	1	2023	12.677.663,00	Baik
14	3.06.01.02.132	Video Conference	Logitech	1	2023	23.410.000,00	Baik
15	3.10.01.02.002	Laptop	Acer TravelMate	5	2023	172.494.390,00	Baik
16	96.539.808.4-416. 000	Laser Projector	Epson	1	2023	52.181.269,00	Baik
17	96.539.808.4-416. 000	Kursi kerja	Terraflex	25	2023	124.241.100,00	Baik
18	96.539.808.4-416. 000	Dry box cabinet	Dry Cabinet Wonderful AD-096C	1	2023	14.289.137,00	Baik
19	02.146.223.8-015. 000	Meja kantor	Meja lipat ukuran 140x60x75	25	2023	154.949.225,00	Baik
20	02.146.223.8-015. 000	Hammer test	Hammer test HT225D I	1	2023	22.380.305,00	Baik

No	Kode Barang	Jenis Barang	Merk/ Tipe	Kuan tita	Tahun	Nilai Perolehan	Ket
21	02.146.223.8-015. 000	Meteran laser	GLM 40	1	2023	3.730.051,00	Baik
22	02.808.733.6-023. 000	Loker	Loker pintu frame side panel besi	50	2023	187.629.450,00	Baik
Total						1.070.941.629,0 0	

Sumber: Barang Milik Negara Satker Balai Penyediaan Perumahan Papua II, 2023

Tabel 3.5. Daftar Rekapitulasi Sarana dan Prasarana di Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat

NO	KODE BARANG	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	NILAI	KETERANGAN
1	3.05.01.04.001	Lemari Besi/Metal	Buah	3	7.425.000	Baik
	3.05.01.04.002	Lemari Kayu	Buah	5	9.660.000	Baik
3	3.05.01.04.007	Brankas	Buah	1	5.000.000	Baik
4	3.05.01.05.048	Lcd Projector/ Infocus	Buah	2	24.879.700	Baik
5	3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	Buah	24	51.715.000	Baik
6	3.05.02.01.003	Kursi Besi/ Metal	Buah	45	39.247.000	Baik
7	3.05.02.01.006	Bangku Panjang Besi/ Metal	Buah	1	10.450.000	Baik
8	3.05.02.01.007	Bangku Panjang Kayu	Buah	1	14.795.000	Baik
9	3.05.02.01.009	Meja Komputer	Buah	1	550.000	Baik
10	3.05.02.04.004	A.C. Split	Buah	6	22.400.000	Baik
11	3.05.02.06.005	Amplifier	Buah	1	5.720.000	Baik
12	3.05.02.06.008	Sound System	Buah	1	12.816.100	Baik
13	3.05.02.06.016	Mic Conference	Buah	1	4.180.000	Baik
14	3.05.02.06.020	Camera Vidio	Buah	1	1.978.900	Baik
15	3.06.01.02.128	Camera Digital	Buah	3	28.710.000	Baik
16	3.06.01.02.135	Lcd Monitor	Buah	1	19.745.000	Baik
17	3.06.01.02.167	Drone	Buah	2	49.500.000	Baik
18	3.06.01.05.038	Gps Receiver	Buah	3	23.100.000	Baik

NO	KODE BARANG	URAIAN	SATUAN	KUANTITAS	NILAI	KETERANGAN
19	3.10.01.02.001	P.C Unit	Buah	7	54.340.000	Baik
20	3.10.01.02.002	Lap Top	Buah	22	384.822.843	Baik
21	3.10.02.02.010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Buah	1	6.805.743	Baik
22	3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	15	49.404.527	Baik
TOTAL					827.244.813	

Sumber: Barang Milik Negara Satker Balai Penyediaan Perumahan Papua II, 2023

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dalam rangka mendukung program dan kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. DIPA awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dengan Nomor : SP DIPA-033.07.1.420161/2023 Bulan Januari 2023 sebesar Rp. 4.637.900.000. Selanjutnya DIPA mengalami revisi beberapa kali yang tertuang pada Tabel 3.5, sehingga pagu akhir sebesar Rp. 7.601.631.000 yang terinci pada Tabel 3.4.
2. DIPA awal Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat dengan Nomor SP DIPA-033.07.1.401688/2023 Bulan Januari 2023 sebesar Rp 90,273,828,000. Selanjutnya DIPA tersebut mengalami dua kali revisi yang tertuang dalam Tabel 3.7. Sehingga pagu akhir menjadi sebesar Rp 75,713,791,000 yang dirinci pada Tabel. 3.6.

Tabel 3.6 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Akhir Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II TA. 2023

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output)	Pagu (Rp)
1	033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.913.456.000
	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	3.913.456.000
	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3.913.456.000
2	033.07.WA	Program Dukungan Manajemen	3.688.175.000
	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	3.688.175.000
	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.027.175.000
	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	661.000.000
Total			7.601.631.000

Sumber: E-monitoring/diakses tanggal 10 Januari 2024

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-033.07.1.420161/2023 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II memiliki pagu awal sejumlah Rp. 4.637.900.000 dan mengalami revisi sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.7 Revisi Anggaran Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

No.	DIPA/ Tanggal Revisi	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	DIPA Awal	4.637.900.000,-	
2	Revisi I 12 April 2023	4.878.200.000,-	Penambahan anggaran dalam Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kerja Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan (Pendampingan Pengembangan Penerapan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan pada Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Susun (Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Susun).
3	Revisi II 30 Agustus 2023	Rp. 6,640,631,000,-	Penambahan anggaran pada Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana dan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan (Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal)
4	Revisi III 10 November 2023	Rp. 7,601,631,000,-	Penambahan anggaran pada Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana dan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan (Layanan Dukungan Manajemen Internal dan Layanan Sarana dan Prasarana Internal)

Sumber: Revisi DIPA ke-04 TA 2023 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Tabel 3.8 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Akhir
Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat TA. 2023

No.	Kode	Program/Kegiatan/Output)	Pagu (Rp)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	73.986.791.000
	ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	497.386.000
	CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	20.336.515.000
	CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	2.824.690.000
	RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	50.328.200.000

Program Dukungan Manajemen			
2	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	1.727.000.000
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.727.000.000
Total			75.713.791.000

Sumber: E-monitoring/diakses tanggal 10 Januari 2024

Tabel 3.9 Revisi Anggaran Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat

No.	DIPA/ Tanggal Revisi	Pagu Anggaran (Rp)	Keterangan
1	DIPA Awal	Rp 90,273,828,000,-	
2	Revisi I 12 April 2023	Rp 96,284,698,000,-	Penambahan anggaran
3	Revisi II 25 Juli 2023	Rp. 83,912,398,000,-	Penambahan anggaran
4	Revisi III 30 Agustus 2023	Rp 86,001,928,000,-	Penambahan anggaran
5	Revisi IV 30 Agustus 2023	Rp 75,725,242,000,-	Pengurangan anggaran
6	Revisi V 19 Desember 2023	Rp 75,713,791,000,-	Pengurangan anggaran

Sumber: Revisi DIPA ke-06 TA 2023 Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat

BAB 4

AKUNTABILITAS KINERJA



Pada Bab ini akan dijabarkan mengenai Capaian Kinerja, Perbandingan Kinerja, dan Realisasi Anggaran pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.

4.1 Capaian Kinerja Satuan Kerja

Capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II memiliki dampak pengaruh langsung terhadap isu strategis dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Papua Barat. Program yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satuan Kerja Provinsi Papua Barat dalam menghadapi isu strategis dan menurunkan tingginya angka *backlog* di Provinsi Papua Barat yang dilandaskan pada visi Kementerian PUPR. Realisasi indikator Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II telah memenuhi target yang direncanakan sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi Berdasarkan Capaian Kinerja BP2P Papua II TA. 2023

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK 2023	REALISASI	CAPAIAN
Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman					
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan	4 Laporan	4 Laporan	100%
		2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1425 Unit	1425 Unit	100%
		3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	43 Unit	43 Unit	100%
		4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	3 Tower	3 Tower	100%
		5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	- Unit	- Unit	-
		6. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	- Unit	- Unit	-
		7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat Fasilitas layanan bantuan PSU	124 Unit	244 Unit	196,77%
		8. Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan	2 Laporan	100%
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan					
2	Meningkatnya a efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan	1 Layanan	100%
		2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan	2 Layanan	100%
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan	2 Layanan	100%

Capaian program di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II terbagi menjadi Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman dan Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman

a. Penyusunan Perencanaan Penyediaan

Penyusunan laporan perencanaan penyediaan perumahan tahun 2023 telah dilaksanakan dengan capaian 100% yang berjumlah 4 laporan. Laporan tersebut terdiri dari dokumen kegiatan Sinkronisasi Program Pusat-Daerah, Pembinaan Penyelenggaraan PKP, Verifikasi dan Monitoring dan Evaluasi pada Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat.

Tabel 4.2 Realisasi Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan Tahun 2023

No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Fisik (%)
Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II				
1	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	100,00
2	Sinkronisasi Program Pusat - Daerah	1	Dokumen	100,00
3	Pembinaan Penyelenggaraan PKP	1	Dokumen	100,00
4	Verifikasi dan Monev	1	Dokumen	100,00
Satker Penyediaan Perumahan Papua II				
1	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	100,00
2	Verifikasi dan Monev	1	Laporan	100,00

Sumber: e-monitoring.pu.go.id diakses tanggal 31 Desember 2023

Dokumen Kegiatan Sinkronisasi Program Pusat-Daerah disusun berdasarkan: 1) Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat Daerah Tahun 2023 Tahap I yang dilaksanakan pada hari Senin-Selasa, 15-16 Mei Tahun 2023 berlokasi di Ruang Rapat Swiss-Belhotel, Kota Sorong secara daring dan luring; dan 2) Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat Daerah Tahap II yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 25 Oktober 2023 berlokasi di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong dilaksanakan secara daring dan luring.





Gambar 4.1 Kegiatan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat Daerah TA. 2023 Tahap I



Gambar 4.2 Kegiatan Rapat Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pusat Daerah TA. 2023 Tahap II

Penyusunan dokumen Pembinaan Penyelenggaraan PKP disusun berdasarkan Rapat Koordinasi II Finalisasi Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya TA. 2023 pada Hari Selasa, 24 Oktober 2023 berlokasi di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong secara luring dan daring.



Gambar 4.3 Rapat Koordinasi II Finalisasi Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya TA. 2023

b. Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Tabel 4.3 Realisasi Jumlah Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya TA.2023

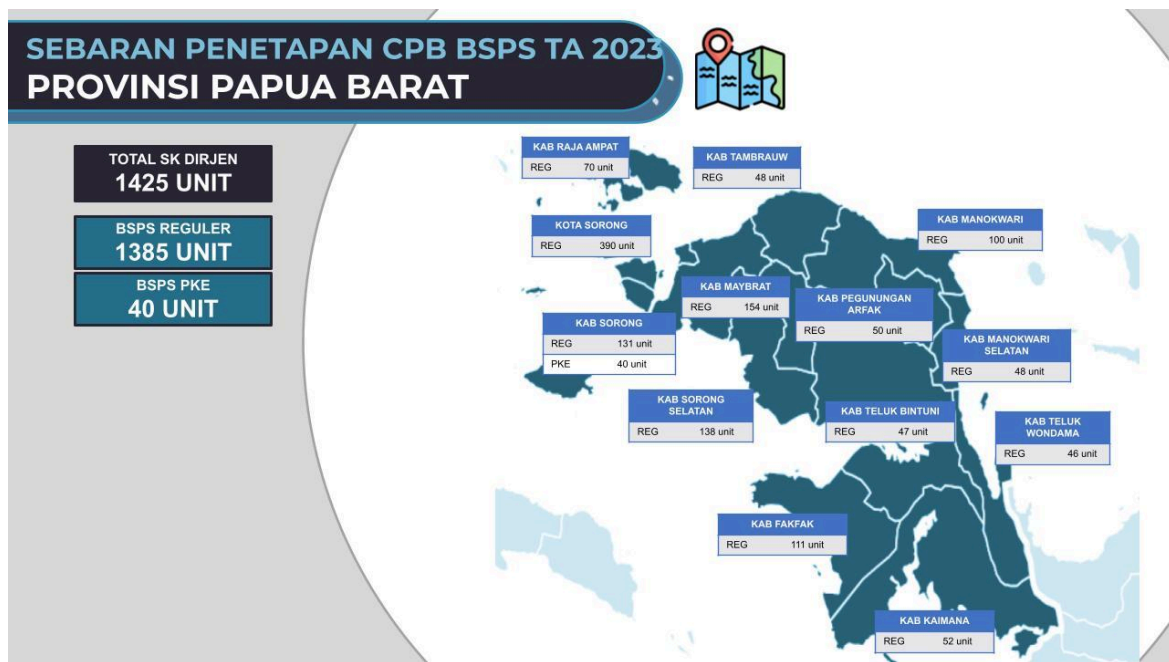
No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Fisik (%)
1	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	1425	unit/Hektar/KK/L iter/detik/SR	100,00
2	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1425	Unit	100,00
3	PSU Rumah Swadaya	1	Paket	100,00
4	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1	Laporan	100,00

Sumber: e-monitoring.pu.go.id diakses tanggal 31 Desember 2023

Berdasarkan Tabel 4.3 Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya telah dilaksanakan dengan capaian 100% dengan jumlah 1425 unit yang terdiri dari 1385 unit reguler dan 40 unit PKE yang tersebar di 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Capaian kinerja tahun 2023 pada kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Rincian unit pada dan lokasi kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dituangkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Sebaran Lokasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Kategori	Alokasi (Unit)
1	Kab. Manokwari	Reguler	100
2	Kota Sorong	Reguler	390
3	Kab. Sorong	Reguler	131
4		PKE	40
5	Kab. Sorong Selatan	Reguler	138
6	Kab. Teluk Wondama	Reguler	46
7	Kab. Manokwari Selatan	Reguler	48
8	Kab. Tambrau	Reguler	48
9	Kab. Pegunungan Arfak	Reguler	50
10	Kab. Teluk Bintuni	Reguler	47
11	Kab. Fakfak	Reguler	111
12	Kab. Kaimana	Reguler	52
13	Kab. Raja Ampat	Reguler	70
Total			1425



Gambar 4.4 Sebaran Alokasi BSPS TA. 2023

c. Rumah Susun yang dibangun

Tabel 4.5 Realisasi Jumlah Rumah Susun yang dibangun Tahun 2023

No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Fisik (%)
1	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	43	unit/Hektar/KK/ Liter/detik/SR	100,00
2	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua Fakfak	1	Paket	100,00
3	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Nurul Yaqin	2	Paket	100,00
4	Pembangunan Rumah Susun Universitas Muhammadiyah Sorong	43	Unit	100,00
5	Meubelair Rumah Susun Universitas Muhammadiyah Sorong	1	Paket	100,00
6	Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua Fakfak	14	Unit	100,00
7	Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Nurul Yaqin	1	Paket	100,00
8	Pekerjaan Finishing dan PSU (Air bersih dan landscape) Rumah Susun Seminari Menengah Petrus Van Diepen Keuskupan Manokwari	1	Paket	100,00
9	Pemasangan Genset Rumah Susun ASN Kab. Tambrau	1	Paket	100,00
10	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Universitas Muhammadiyah Sorong	1	Paket	100,00
11	Pengawasan dan Pengendalian Rumah Susun	1	Laporan	100,00
12	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Sekolah Tinggi Theologia GPI Papua Fakfak	1	Paket	100,00
13	Supervisi Pekerjaan Finishing dan PSU (Air bersih dan landscape) Rumah Susun Seminari Menengah Petrus Van Diepen Keuskupan Manokwari	1	Paket	100,00
14	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren Nurul Yaqin	1	Paket	100,00

Sumber: e-monitoring.pu.go.id diakses tanggal 31 Desember 2023

Berdasarkan Tabel 4.5, Pembangunan Rumah Susun telah dilaksanakan dengan jumlah 43 unit dengan capaian 100% dengan pembangunan MYC 2022-2023. Rincian rumah susun yang dibangun dijabarkan dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Rincian Alokasi Pembangunan Rumah Susun Tahun 2023

No	Rusun	Jenis Pembangunan	Lokasi	Tipo logi	Jumlah Unit	Tgl. SPMK	Tgl. Akhir Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1	Rumah Susun Universitas Muhammadiyah Sorong	MYC 2022-2023	Kota Sorong, Papua Barat Daya	T.24 / Pende k 3.Lt	43	04/11/2022	19/09/2023	936.704.000

d. Rumah Susun yang dipelihara

Tabel 4.7 Realisasi Jumlah Rumah Susun yang dipelihara Tahun 2023

No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Fisik (%)
1	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama	3	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	100,00
2	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Ponpes Hidayatullah Manokwari	1	Paket	100,00
3	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun TNI AL Sorong	1	Paket	100,00
4	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Gereja Pantekosta di Indonesia Sekolah Alkitab Manokwari	1	Paket	100,00
5	Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Ponpes Hidayatullah Manokwari	1	Paket	100,00
6	Pengawasan dan Pengendalian Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun	1	Laporan	100,00
7	Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun TNI AL Sorong	1	Paket	100,00
8	Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Gereja Pantekosta di Indonesia Sekolah Alkitab Manokwari	1	Paket	100,00

Sumber: e-monitoring.pu.go.id diakses tanggal 31 Desember 2023

Berdasarkan Tabel 4.7, pemeliharaan Rumah Susun tahun 2023 telah dilaksanakan sebanyak 3 tower. Rumah susun yang dipelihara memiliki capaian 100%. Daftar paket Rusun yang dipelihara dijabarkan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Rincian Alokasi Pemeliharaan Rumah Susun Tahun 2023

No	Rusun	Jenis Pembangunan	Lokasi	Tipeologi	Jumlah Tower	Tgl. SPMK	Tgl. Akhir Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)
1	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun TNI AL Sorong	SYC 2023	Kota Sorong, Papua Barat Daya	Tipe 36 / 3 lantai	1	07/11/2023	31/12/2023	642.395.000
2	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Gereja Pantekosta di Indonesia Alkitab Manokwari	SYC 2023	Kab. Manokwari	T. 24 Pendek / 3 lantai	1	07/11/2023	31/12/2023	721.016.000,00
3	Pondok Pesantren Hidayatullah	SYC 2023	Kab. Manokwari	T. 24 Pendek / 3 lantai	1	25/05/2023	22/08/2023	795.690.000

e. Rumah MBR yang mendapat Fasilitas layanan bantuan PSU

Tabel 4.9 Realisasi Jumlah MBR yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU Tahun 2023

No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Fisik (%)
1	Bantuan PSU Bidang Perumahan	124	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	100,00
2	Penyusunan DED dan Supervisi Bantuan PSU Perumahan bagi MBR	1	Laporan	100,00
3	Pembangunan PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Green Valley Residence Kabupaten Manokwari	1	Paket	100,00
4	Pembangunan PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Sogun Permai 5 Kabupaten Manokwari	1	Paket	100,00
5	Pembangunan PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Arfai Salak Kabupaten Manokwari	1	Paket	100,00
6	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan PSU Perumahan bagi MBR	1	Laporan	100,00

Sumber: e-monitoring.pu.go.id diakses tanggal 31 Desember 2023

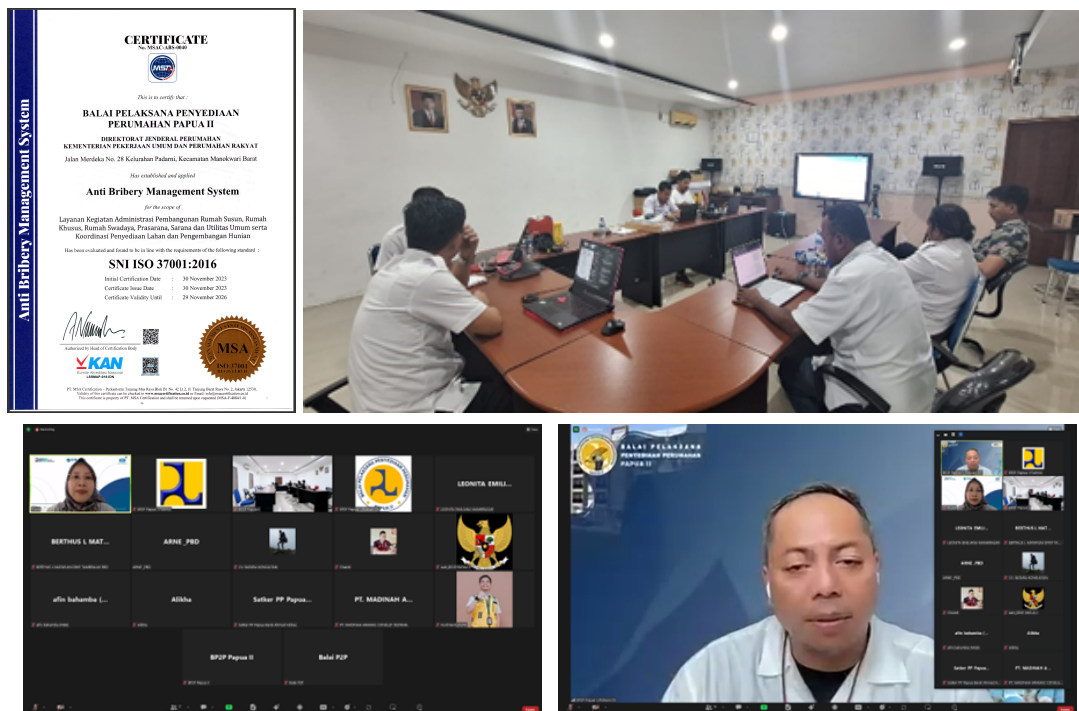
Berdasarkan Tabel 4.9, jumlah rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU berjumlah 244 unit dengan capaian 196,77% yang berlokasi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat dengan rincian yang dijabarkan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Rincian Alokasi jumlah MBR yang mendapat Fasilitas Layanan Bantuan PSU Tahun 2023

No	Perumahan	Lokasi	Jumlah Unit	Tgl. SPMK	Tgl. Akhir Kontrak	Pagu (Rp)
1	Green Valley Residence	Kab. Manokwari	120	03/04/2023	30/08/2023	995.841.000
2	Sogun Permai 5	Kab. Manokwari	73	31/07/2023	28/10/2023	600.803.000
3	Arfai Salak	Kab. Manokwari	51	08/09/2023	06/12/2023	471.240.000

f. Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko

Indikator pembinaan dan pengembangan KI dan MR merupakan indikator yang baru disusun pada tahun 2023 dikarenakan adanya penambahan anggaran terkait kegiatan dari Direktorat Kepatuhan Intern. Penyusunan laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko sudah tercapai dengan capaian 100% yang berjumlah 2 laporan. Laporan tersebut terdiri dari dokumen pendampingan manajemen risiko dan ZI dan pengembangan dan penerapan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II.



Gambar 4.5 Pendampingan Pengembangan Penerapan SMAP di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Tabel 4.11 Realisasi Pembinaan dan Pengembangan KI dan MR Tahun 2023

No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Fisik (%)
1	Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	100,00
2	Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko dan ZI	1	Dokumen	100,00
3	Pendampingan Pengembangan dan Penerapan SMAP	1	Dokumen	100,00

Sumber: e-monitoring.pu.go.id diakses tanggal 31 Desember 2023

2. Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan

a. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Tabel 4.12 Realisasi Layanan Sarana dan Prasarana Internal Tahun 2023

No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Fisik (%)
1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/m2/Paket	100,00
2	Layanan Sarana Internal	1	Unit/m2/Paket	100,00
3	Pengadaan Pengolah Data	1	Paket	100,00

Sumber: e-monitoring.pu.go.id diakses tanggal 31 Desember 2023

Kinerja Layanan sarana dan prasarana internal pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II telah tercapai sebesar 100% dengan jumlah 1 layanan. Layanan tersebut berupa pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa peralatan dan mesin yaitu video conference, laptop, speaker, brankas, drone dll.

b. Layanan Dukungan Manajemen Satker

Tabel 4.13 Realisasi Layanan Dukungan Manajemen Satker Tahun 2023

No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Fisik (%)
Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II				
1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			100,00
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan/Laporan/Dokumen	100,00
3	Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen	100,00
4	Dukungan Pelaksanaan Pembangunan	1	Dokumen	100,00
Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat				
1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			100,00
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen	100,00
3	Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen	100,00
4	Dukungan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan	100,00

Sumber: e-monitoring.pu.go.id diakses tanggal 31 Desember 2023

Kinerja layanan dukungan manajemen satker pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II telah tercapai 100% dengan jumlah 2 layanan. Layanan tersebut berupa dukungan pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan operasional Satker Balai pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satker Penyediaan Perumahan Papua II yaitu dukungan pelaksanaan pembangunan seperti pengadaan ground breaking dan peresmian (spanduk, backdrop, banner), belanja sewa (sound system, tenda, kursi, panggung), belanja perjalanan biasa (uang harian perjalanan dinas dan biaya penginapan).

c. Layanan Perkantoran

Tabel 4.14 Realisasi Layanan Perkantoran 2023

No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Fisik (%)
Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II				
1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			100,00
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen	100,00
3	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen	100,00
4	Administrasi Kegiatan Balai	1	Dokumen	100,00
Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat				
1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			100,00
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan/Laporan/Dokumen	100,00
3	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen	100,00
4	Administrasi Kegiatan Satker	1	Laporan	100,00

Sumber: e-monitoring.pu.go.id diakses tanggal 31 Desember 2023

Kinerja layanan perkantoran telah tercapai 100% dengan jumlah 2 layanan. Layanan tersebut berupa dukungan pelaksanaan pembangunan dan pemenuhan operasional dan pemeliharaan kantor Balai pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II berupa belanja keperluan perkantoran, belanja honor operasional satuan kerja, belanja operasional barang lainnya, langganan listrik, sewa dll.

Rekap capaian kinerja yang dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan terlampir pada Tabel 4.11.

Tabel 4.15 Rekap Capaian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target	Satuan	Pagu	Realisasi	Keu	Fisik
----	------	-----------------------	--------	--------	------	-----------	-----	-------

			Vol		(Rp Ribu)	(Rp Ribu)	(%)	(%)
1	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			3.913.456	3.826.366	97,77	100,00
2	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian	3.913.456	3.826.366	97,77	100,00
3	4978.ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1.771.896	1.725.823	97,40	100,00
4	4978.ABF.009.101.A	Sinkronisasi Program Pusat - Daerah	1	Dokumen	370.440	366.202	98,86	100,00
5	4978.ABF.009.101.B	Pembinaan Penyelenggaraan PKP	1	Dokumen	859.769	820.479	95,43	100,00
6	4978.ABF.009.101.C	Verifikasi dan Monev	1	Dokumen	541.687	539.142	99,53	100,00
7	4978.ABF.011	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Swadaya	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	151.000	150.989	99,99	100,00
8	4978.ABF.011.100.A	Kebutuhan Survey dan Wasdal BPS	1	Dokumen	151.000	150.989	99,99	100,00
9	4978.ABF.015	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Susun	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	1.150.000	1.119.862	97,38	100,00
10	4978.ABF.015.104.A	Monitoring dan Evaluasi Rumah Susun	1	Laporan	150.800	148.371	98,39	100,00
11	4978.ABF.015.104.B	Perencanaan Pemeliharaan Rumah Susun	1	Dokumen	599.200	596.622	99,57	100,00
12	4978.ABF.015.104.C	Pendampingan dan Persiapan Perencanaan Rumah Susun DOB	1	Dokumen	400.000	374.868	93,72	100,00
13	4978.ABF.016	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Khusus	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	110.000	109.870	99,88	100,00
14	4978.ABF.016.104.A	Wasdal Rusus	1	Dokumen	110.000	109.870	99,88	100,00
15	4978.ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	475.500	467.594	98,34	100,00
16	4978.ABF.021.101.A	Penjaringan Usulan dan Verifikasi Lokasi Bantuan PSU Perumahan bagi MBR TA 2024, serta Koordinasi Pendataan PSR	1	Dokumen	475.500	467.594	98,34	100,00
17	4978.ABF.024	Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kerja Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	255.060	252.227	98,89	100,00
18	4978.ABF.024.100.A	Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko Dan ZI	1	Dokumen	89.760	88.929	99,07	100,00
19	4978.ABF.024.103.A	Pendampingan Pengembangan dan Penerapan SMAP	1	Dokumen	165.300	163.298	98,79	100,00
20	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			3.688.175	3.643.649	98,79	99,94
21	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/ Dokumen	3.027.175	2.984.968	98,61	100,00
22	5578.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/ Dokumen	331.000	325.674	98,39	100,00
23	5578.EBA.962.101.A	Dukungan Pelaksanaan Pembangunan	1	Dokumen	331.000	325.674	98,39	100,00
24	5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/ Dokumen	2.696.175	2.659.294	98,63	100,00
25	5578.EBA.994.002.A	Administrasi Kegiatan Balai	1	Dokumen	2.696.175	2.659.294	98,63	100,00
26	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		Unit/m2/Paket	661.000	658.681	99,65	99,65
27	5578.EBB.951	Layanan Sarana Internal	1	Unit/m2/Paket	661.000	658.681	99,65	99,65
28	5578.EBB.951.101.A	Pengadaan Pengolah Data	1	Paket	661.000	658.681	99,65	99,65
TOTAL					7.601.631	7.470.015	98,27	99,97

Sumber: e-monitoring.pu.go.id diakses tanggal 31 Desember 2023

Tabel 4.16 Rekap Capaian Kinerja Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
1	978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni			73.986.791	73.408.760	99,22	100,00
2	978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana		Rekomendasi Kebijakan/Kajian	497.386	479.580	96,42	100,00
3	978.ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan	1	Rekomendasi Kebijakan/Kajian	497.386	479.580	96,42	100,00
4	978.ABF.009.101.A	Verifikasi dan Monev	1	Laporan	497.386	479.580	96,42	100,00
5	978.CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	20.336.515	20.126.413	98,97	100,00
6	978.CBB.005	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi	43	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	20.336.515	20.126.413	98,97	100,00
7	978.CBB.005.100.A	Perencanaan Pembangunan Rumah usun Sekolah Tinggi Theologia GPI apua Fakfak	1	Paket	150.000	149.476	99,65	100,00
8	978.CBB.005.100.B	Perencanaan Pembangunan Rumah usun Pondok Pesantren Nurul Yaqin	2	Paket	150.000	149.797	99,86	100,00
9	978.CBB.005.101.A	Pembangunan Rumah Susun niversitas Muhammadiyah Sorong	43	Unit	11.074.480	11.074.480	100,00	100,00
10	978.CBB.005.101.B	Meubelair Rumah Susun Universitas Muhammadiyah Sorong	1	Paket	1.716.800	1.602.234	93,33	100,00
11	978.CBB.005.101.C	Pembangunan Rumah Susun Sekolah inggi Theologia GPI Papua Fakfak	14	Unit	1.890.000	1.882.500	99,60	100,00
12	978.CBB.005.101.D	Pembangunan Rumah Susun Pondok esantren Nurul Yaqin	1	Paket	1.474.400	1.423.440	96,54	100,00
13	978.CBB.005.101.E	Pekerjaan Finishing dan PSU (Air ersih dan landscape) Rumah Susun eminari Menengah Petrus Van iepen Keuskupan Manokwari	1	Paket	665.697	665.697	100,00	100,00
14	978.CBB.005.101.F	Pemasangan Genset Rumah Susun SN Kab. Tambrau	1	Paket	475.840	474.629	99,75	100,00
15	978.CBB.005.102.A	Manajemen Konstruksi embangunan Rumah Susun niversitas Muhammadiyah Sorong	1	Paket	735.504	735.504	100,00	100,00
16	978.CBB.005.102.B	Pengawasan dan Pengendalian umah Susun	1	Laporan	1.696.200	1.691.836	99,74	100,00
17	978.CBB.005.102.C	Manajemen Konstruksi embangunan Rumah Susun Sekolah inggi Theologia GPI Papua Fakfak	1	Paket	123.150	121.445	98,62	100,00
18	978.CBB.005.102.D	Supervisi Pekerjaan Finishing dan SU (Air bersih dan landscape) Rumah usun Seminari Menengah Petrus Van iepen Keuskupan Manokwari	1	Paket	71.844	71.844	100,00	100,00
19	978.CBB.005.102.E	Manajemen Konstruksi embangunan Rumah Susun Pondok esantren Nurul Yaqin	1	Paket	112.600	83.530	74,18	100,00
20	978.CDB	OM Prasarana Bidang Perumahan an Permukiman		unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	2.824.690	2.792.580	98,86	100,00
21	978.CDB.004	Pemeliharaan dan Perawatan Tower umah Susun Lembaga Pendidikan eagama Berasrama	3	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	2.824.690	2.792.580	98,86	100,00
22	978.CDB.004.101.A	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah usun Ponpes Hidayatullah Manokwari	1	Paket	795.690	795.690	100,00	100,00
23	978.CDB.004.101.B	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah usun TNI AL Sorong	1	Paket	670.000	642.395	95,88	100,00
24	4978.CDB.004.101.C	Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Gereja Pantekosta di Indonesia Sekolah Alkitab Manokwari	1	Paket	723.000	721.016	99,73	100,00
25	4978.CDB.004.102.A	Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Ponpes Hidayatullah Manokwari	1	Paket	106.000	106.000	100,00	100,00
26	4978.CDB.004.102.B	Pengawasan dan Pengendalian Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun	1	Laporan	400.000	398.625	99,66	100,00

No	Kode	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keu (%)	Fisik (%)
27	4978.CDB.004.102.C	Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun TNI AL Sorong	1	Paket	62.000	61.255	98,80	100,00
28	4978.CDB.004.102.D	Supervisi Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun Gereja Pantekosta di Indonesia Sekolah Alkitab Manokwari	1	Paket	68.000	67.599	99,41	100,00
29	4978.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman		unit/Hektar/KK/Liter/	50.328.200	50.010.187	99,37	100,00
30	4978.RBB.001	Bantuan PSU Bidang Perumahan	124	unit/Hektar/KK/Liter/	2.773.810	2.746.430	99,01	100,00
31	4978.RBB.001.100.A	Penyusunan DED dan Supervisi Bantuan PSU Perumahan bagi MBR	1	Laporan	40.500	40.500	100,00	100,00
32	4978.RBB.001.101.A	Pembangunan PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Green Valley Residence Kabupaten Manokwari	1	Paket	995.841	995.841	100,00	100,00
33	4978.RBB.001.101.B	Pembangunan PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Sogun Permai 5 Kabupaten Manokwari	1	Paket	600.803	600.803	100,00	100,00
34	4978.RBB.001.101.C	Pembangunan PSU Rumah Umum MBR di Perumahan Arfai Salak Kabupaten Manokwari	1	Paket	491.166	471.240	95,94	100,00
35	4978.RBB.001.103.A	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan PSU Perumahan bagi MBR	1	Laporan	645.500	638.046	98,85	100,00
36	4978.RBB.003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI	1	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	1.239.485	1.056.412	85,23	100,00
37	4978.RBB.003.100.A	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun ASN Pemprov Papua Barat Daya	2	Paket	350.000	299.650	85,61	100,00
38	4978.RBB.003.100.B	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun ASN PUPR	2	Paket	400.000	299.621	74,91	100,00
39	4978.RBB.003.100.C	Perencanaan Pembangunan Rumah Susun TNI AL	1	Paket	150.000	149.773	99,85	100,00
40	4978.RBB.003.102.A	Pengawasan dan Pengendalian Rumah Susun DOB	1	Laporan	339.485	307.368	90,54	100,00
41	4978.RBB.008	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	1425	unit/Hektar/KK/Liter/detik/SR	46.314.905	46.207.345	99,77	100,00
42	4978.RBB.008.100.A	Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1425	Unit	41.638.500	41.638.500	100,00	100,00
43	4978.RBB.008.100.B	PSU Rumah Swadaya	1	Paket	406.646	406.646	100,00	100,00
44	4978.RBB.008.103.A	Pembinaan Teknis Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1	Laporan	4.269.759	4.162.199	97,48	100,00
45	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan			1.727.000	1.675.943	97,04	100,00
46	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan/Laporan/Dokumen	1.727.000	1.675.943	97,04	100,00
47	5578.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan/Laporan/Dokumen	527.000	526.942	99,99	100,00
48	5578.EBA.962.101.A	Dukungan Pelaksanaan Pembangunan	1	Laporan	527.000	526.942	99,99	100,00
49	5578.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan/Laporan/Dokumen	1.200.000	1.149.001	95,75	100,00
50	5578.EBA.994.002.A	Administrasi Kegiatan Satker	1	Laporan	1.200.000	1.149.001	95,75	100,00
TOTAL					75.713.791	75.084.703	99,17	100,00

Sumber: e-monitoring.pu.go.id diakses tanggal 31 Desember 2023

4.2 Perbandingan Kinerja Satuan Kerja

Pembahasan perbandingan kinerja akan dibahas mengenai perbandingan terhadap tahun sebelumnya, terhadap realisasi penyerapan anggaran, dan perbandingan kinerja dengan wilayah lain.

4.2.1 Perbandingan Kinerja terhadap Tahun Sebelumnya

Pengukuran perbandingan capaian kinerja pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II terhadap tahun sebelumnya menggambarkan capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II pada tahun 2022 dan 2023. Perbandingan tersebut berupa target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan capaiannya. Perbandingan indikator kinerja pada tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.17 Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dan 2023

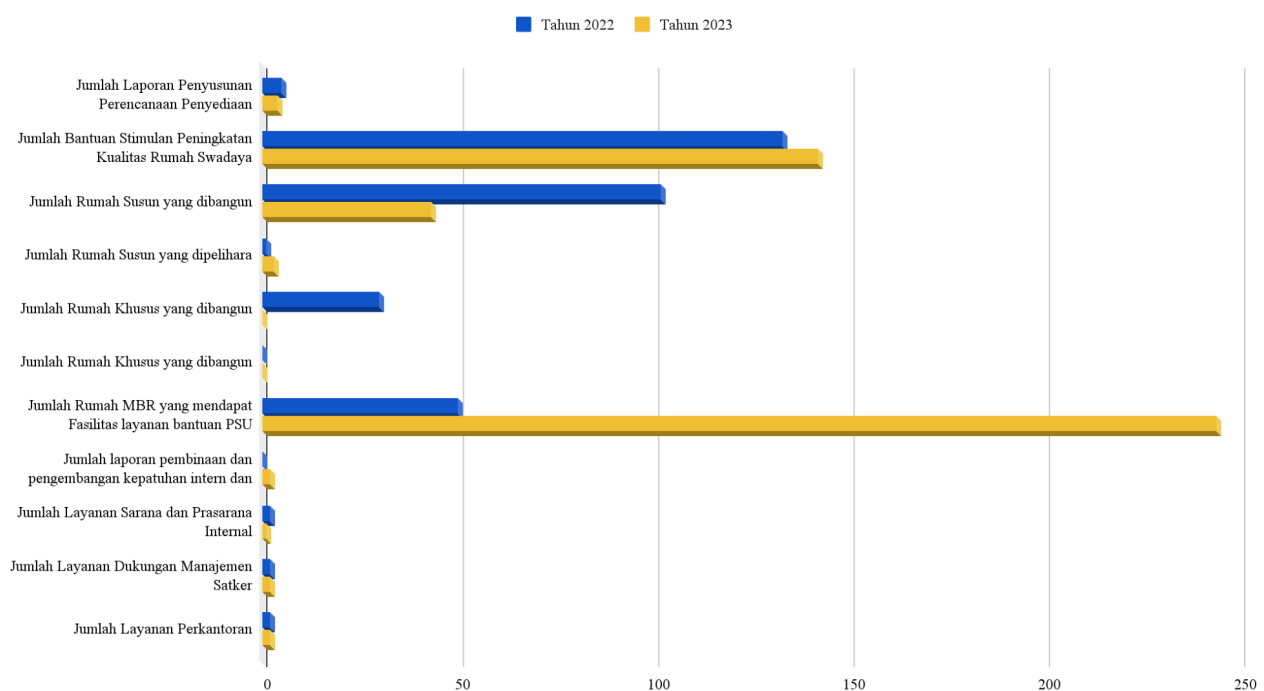
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022			2023		
				TARGET PK 2023	REALISASI	CAPAIAN	TARGET PK 2023	REALISASI	CAPAIAN
Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman									
1	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1. Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan	Laporan	5	5	100%	4	4	100%
		2. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	Unit	1338	1337	99,92%	1425	1425	100%
		3. Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	102	102	100%	43	43	100%
		4. Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Tower	1	1	100%	3	3	100%
		5. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	30	30	100%	-	-	-
		6. Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	-	-	-	-	-	-
		7. Jumlah Rumah MBR yang mendapat Fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	50	50	100%	124	244	196,77%
		8. Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	Laporan	-	-	-	2	2	100%
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan									
2	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariat an Direktorat Jenderal Perumahan	1. Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	2	2	100%	1	1	100%
		2. Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	2	2	100%	2	2	100%
		3. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	100%	2	2	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi

Terdapat peningkatan terhadap capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023. Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya mengalami peningkatan kinerja yaitu sejumlah 1338 unit pada tahun 2022 dengan capaian kinerja 99,92% dan meningkat sejumlah 1425 unit pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 100%. Terdapat peningkatan terhadap jumlah rumah susun yang dipelihara yaitu 1 tower pada tahun 2022 menjadi 3 tower pada tahun 2023. Terdapat peningkatan terhadap Jumlah Rumah MBR yang mendapat Fasilitas layanan bantuan PSU yaitu sejumlah 50 unit tahun 2022 dengan capaian 100% menjadi 244 unit dengan capaian 196,77% pada tahun 2023.

Sedangkan, tidak terdapat alokasi pada rumah khusus yang dibangun dan dipelihara. Pada tahun 2023, terdapat tambahan indikator kinerja berupa laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko yang pada tahun 2022 belum ada. Grafik capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dapat dilihat pada Gambar 4.2.

Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dan 2023



Gambar 4.6 Perbandingan Capaian pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

4.2.3 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran

Perbandingan realisasi penyerapan anggaran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II pada tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel x.

Tabel 4.18 Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dan 2023

Satuan Kerja	2022			2023		
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	4.840.931	4.667.907	96,43%	7.601.631	7.470.015	98,27%
Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat	105.728.012	104.259.160	98,65%	75.713.791	75.084.703	99,17%

Berdasarkan Tabel di atas terdapat peningkatan penyerapan capaian realisasi anggaran dari tahun 2022 dan 2023 pada Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat.

4.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja (*Benchmark Kinerja*)

Perbandingan realisasi kinerja dilakukan dengan melakukan perbandingan kinerja antar balai yang berada di dalam 1 (satu) pulau (regional) yaitu perbandingan terhadap Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan di wilayah III yang meliputi daerah Sulawesi dan Maluku.

Tabel 4.19 Perbandingan Realisasi Kinerja antar-wilayah

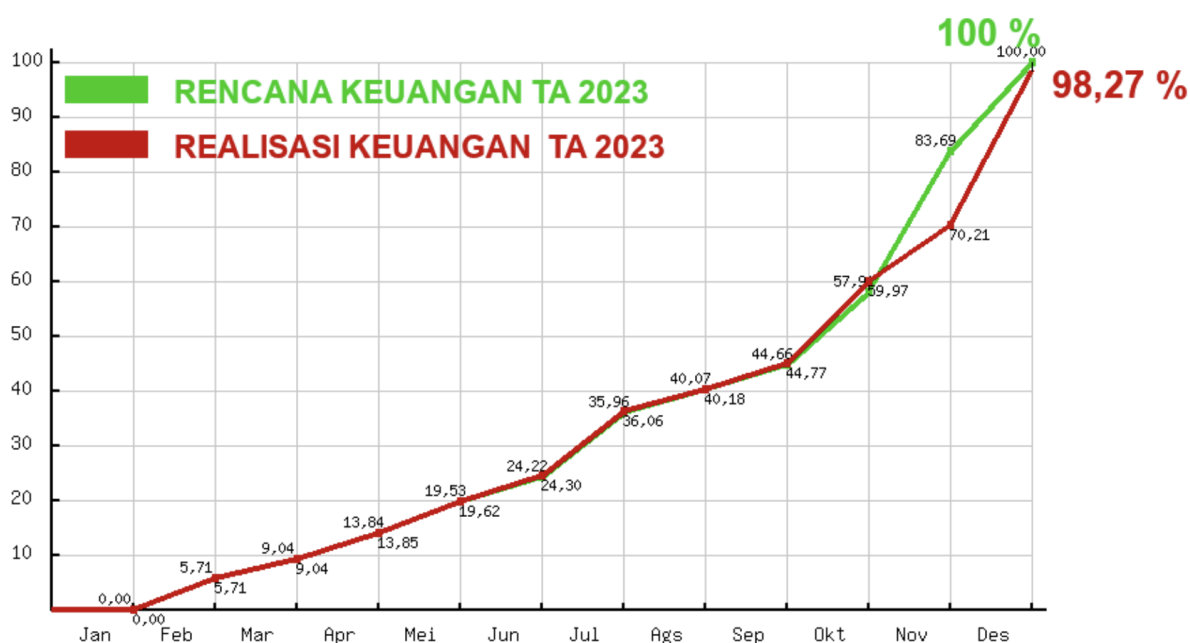
Unit Organisasi/ Unit Kerja	Pagu Anggaran 2023 (Rp.000)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp.000)	Persentase (%)	Kinerja Fisik (%)
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua I	7.112.359	6.793.465	95,52	100,00
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	7.601.631	7.470.015	98,27%	100%
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I	8.163.111	8.105.087	99,29	100%
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi II	8.254.606	9.277.246	99,97	100%
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III	9.277.246	9.028.000	97,31	100%
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku	7.446.880	7.425.397	99,71	100%

Berdasarkan data perbandingan realisasi kinerja antar-wilayah, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II tergolong dalam kategori baik. Realisasi anggaran Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan Papua II berada di peringkat empat dengan persentase penyerapan anggaran sebesar 98,27% dan realisasi fisik sebesar 100%.

4.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2023, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II memiliki alokasi pagu anggaran sejumlah Rp 83.315.422.000 yang terdiri dari Pagu Rp 7.601.631.000 pada Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Pagu Rp 75.713.791.000 pada Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat. Adapun realisasi anggaran pada Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II sebesar 98,27% dan realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan, realisasi anggaran pada Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat sebesar 99,17% dan realisasi fisik mencapai 100%. Kurva S pada Gambar 4.3 dan Gambar 4.4 menjelaskan realisasi anggaran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat.



Renc. e-Mon	0,00	5,71	9,04	13,84	19,53	24,22	35,96	40,07	44,66	57,91	83,69	100,00
Real. Keu	0,00	5,71	9,04	13,85	19,62	24,30	36,06	40,18	44,77	59,97	70,21	98,27

Gambar 4.7 Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan TA. 2023 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

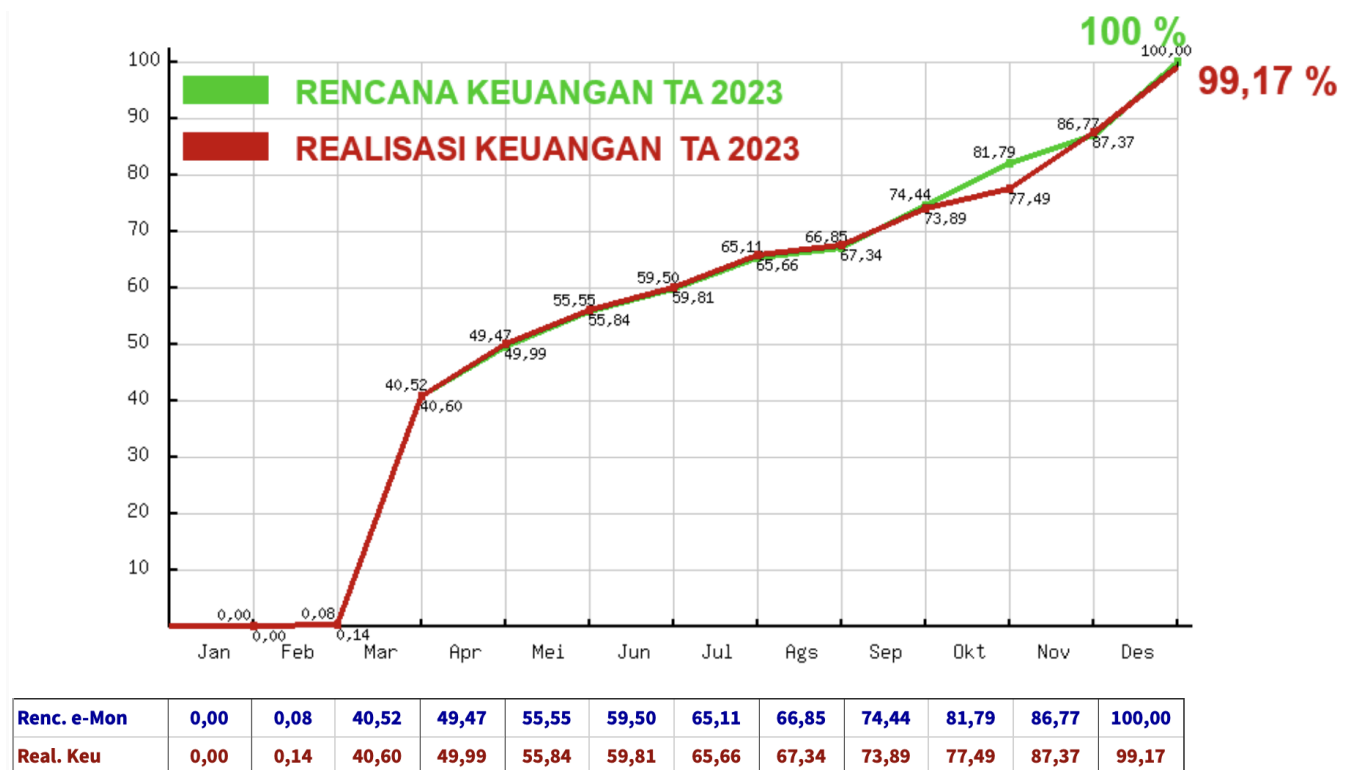
Tabel 4.20 Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan/Output	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
					RN	RL	RN	RL	Kinerja

1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		3.913.456	3.826.366	100,00	97,77	100,00	100,00	100,00
1	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni		3.913.456	3.826.366	100,00	97,77	100,00	100,00	100,00
1	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan/ Kajian	3.913.456	3.826.366	100,00	97,77	100,00	100,00	100,00
2	Program Dukungan Manajemen		3.688.175	3.643.649	100,00	98,79	100,00	99,94	99,94
2	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan		3.688.175	3.643.649	100,00	98,79	100,00	99,94	99,94
2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan/Laporan/Dokumen	3.027.175	2.984.968	100,00	98,61	100,00	100,00	100,00
3	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Unit/m2/Paket	661.000	658.681	100,00	99,65	100,00	99,65	99,65
			7.601.631	7.470.015	100,00	98,27	100,00	99,97	

Sumber: e-monitoring.pu.go.id Bulan Desember tanggal 2 Januari 2023

Berikut adalah Realisasi Anggaran pada Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat.



Gambar 4.8 Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan TA. 2023 Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat

Tabel 4.21 Realisasi Anggaran Kegiatan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2023

NO	Program/Kegiatan/Output	Satuan	Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Keuangan		Fisik		
					RN	RL	RN	RL	Kinerja
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		73.986.791	73.408.760	100,00	99,22	100,00	100,00	100,00
1	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni		73.986.791	73.408.760	100,00	99,22	100,00	100,00	100,00
1	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	Rekomendasi Kebijakan/ Kajian	497.386	479.580	100,00	96,42	100,00	100,00	100,00
2	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	unit/Hektar/ KK/Liter/detik/ SR	20.336.515	20.126.413	100,00	98,97	100,00	100,00	100,00
3	OM Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	unit/Hektar/ KK/Liter/detik/ SR	2.824.690	2.792.580	100,00	98,86	100,00	100,00	100,00
4	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	unit/Hektar/ KK/Liter/detik/ SR	50.328.200	50.010.187	100,00	99,37	100,00	100,00	100,00
2	Program Dukungan Manajemen		1.727.000	1.675.943	100,00	97,04	100,00	100,00	100,00
2	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan		1.727.000	1.675.943	100,00	97,04	100,00	100,00	100,00
5	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan/Laporan/ Dokumen	1.727.000	1.675.943	100,00	97,04	100,00	100,00	100,00
			75.713.791	75.084.703	100,00	99,17	100,00	100,00	

Sumber: e-monitoring.pu.go.id Bulan Desember tanggal 2 Januari 2023

BAB 5

PENUTUP



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang menggambarkan capaian kinerja terhadap suatu instansi/organisasi. Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pada satu tahun anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.

Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II merupakan akumulasi dari Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dan Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat. Realisasi seluruh capaian kinerja mencapai 100% sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah direvisi. Sedangkan, untuk capaian keuangan, Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II (98,27%) maupun Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat (99,17%) memiliki nilai diatas 98% sehingga dapat dinilai sangat baik. Dalam menyelenggarakan infrastruktur bidang perumahan, diharapkan output program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II berkontribusi secara maksimal dalam mendukung infrastruktur perumahan, khususnya di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya.

5.1. Rangkuman Capaian

Capaian kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II telah dilaksanakan dengan optimal yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan tercapai 100% dengan jumlah 4 laporan;
2. Kegiatan Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya tercapai 100% dengan jumlah 1.425 unit;
3. Kegiatan Pembangunan Rumah Susun tercapai 100% dengan jumlah terbangun 43 unit;
4. Kegiatan Pemeliharaan Rumah Susun tercapai 100% dengan jumlah 3 tower rumah susun yang dipelihara;
5. Kegiatan Bantuan PSU bagi Rumah MBR tercapai 196,77% dengan jumlah PSU terbangun pada 244 unit rumah;
6. Kegiatan penyusunan laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko tercapai 100% yang berjumlah 2 laporan;
7. Kegiatan Layanan Sarana dan Prasarana Internal tercapai 100% dengan capaian 2 layanan;
8. Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen tercapai 100% dengan capaian 2 layanan;
9. Kegiatan Layanan Perkantoran tercapai 100% dengan capaian 2 layanan.

5.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

Berikut merupakan permasalahan dan upaya tindak lanjut terhadap pelaksanaan yang dihadapi pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II di tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 5.1 Permasalahan dan Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Belum dilakukan tutup buku permanen karena perlu perbaikan yang harus dikonsolidasikan terlebih dahulu pada tingkat Eselon I (Dirjen Perumahan).	Melakukan konsolidasi dengan bagian keuangan tingkat Eselon I (Dirjen Perumahan) di Bulan Januari.
2	Anggaran untuk sewa kantor Balai belum tersedia dalam DIPA awal TA 2023 karena belum tercantum dalam RKBMN TA 2023.	Melakukan revisi RKBMN dan diusulkan kembali ke Direktorat SSPP dan apabila disetujui maka dilakukan revisi POK pada DIPA TA 2023.
3	Anggaran untuk sewa kendaraan jabatan dan operasional Balai belum tersedia dalam DIPA awal TA 2023 karena belum tercantum dalam RKBMN TA 2023.	Melakukan revisi RKBMN dan diusulkan kembali ke Direktorat SSPP dan apabila disetujui maka dilakukan revisi POK pada DIPA TA 2023.
4	Proses revisi DIPA terkait penambahan kegiatan baru yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).	Mempercepat pengusulan revisi DIPA terkait penambahan kegiatan baru yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sehingga proses penyerapan anggaran dapat segera dilaksanakan.
5	Terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan Pengawasan/Pengendalian Rumah Susun sehingga membuat progres keuangan secara keseluruhan menjadi turun.	Mempercepat proses perekrutan Tenaga Ahli Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sehingga dapat mempercepat proses penyerapan keuangan.
6	Perubahan pejabat administrator (Kepala Balai) yang lama karena memasuki masa purna bakti namun tidak disertai dengan penggantian Kuasa Pengguna Anggaran Balai sehingga proses administrasi tagihan keuangan masih ditandatangani pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang lama.	Proses penandatanganan administrasi tagihan secara Tanda Tangan Elektronik (TTE) karena KPA berada di luar Kab. Manokwari.
7	Terdapat kegiatan tambahan (pembentukan DOB) yang tidak dianggarkan dalam RKAKL sehingga mempengaruhi anggaran monitoring dan evaluasi kegiatan lainnya.	Mengajukan penambahan anggaran pada revisi ke 5.
8	Terdapat penambahan anggaran dalam pada akhir tahun anggaran dalam pekerjaan pengadaan peralatan kantor sehingga menurunkan progres keuangan dan memerlukan waktu dalam proses pengadaan barang tersebut	Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang agar realisasi keuangan dapat segera dilakukan

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun Anggaran 2023, diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan terhadap capaian kinerja dan sebagai bahan evaluasi untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan. Diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak terkait dengan disusunnya laporan ini.

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA





REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ridwan Dibya Sudartha**
Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Iwan Suprijanto**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Pihak Pertama
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, ²² Desember 2023

Pihak Kedua


Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Pihak Pertama


Ridwan Dibya Sudartha
NIP. 19740220 200112 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1 Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	1 Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	4 Laporan
	2 Jumlah Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	1.425 Unit
	3 Jumlah Rumah Susun yang dibangun	43 Unit
	4 Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	3 Tower
	5 Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	- Unit
	6 Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	- Unit
	7 Jumlah Rumah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	124 Unit
	8 Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan kepatuhan intern dan manajemen risiko	2 Laporan
2 Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola kesekretariatan Direktorat Jenderal Perumahan	1 Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 Layanan
	2 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	2 Layanan
	3 Jumlah Layanan Perkantoran	2 Layanan

Kegiatan:

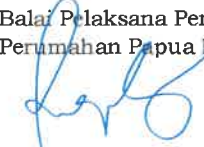
	Anggaran
1. Penyediaan Akses Perumahan Layak dan Aman	Rp 77.900.247.000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	Rp 3.913.456.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat	Rp 73.986.791.000
2. Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp 5.415.175.000
a. Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	Rp 3.688.175.000
b. Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat	Rp 1.727.000.000
Pagu Satker Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II	Rp 7.601.631.000
Pagu Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat	Rp 75.713.791.000
Total	Rp 83.315.422.000

Jakarta, 22 Desember 2023

Direktur Jenderal Perumahan


Iwan Suprijanto
NIP. 19710930 199803 1 001

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II


Ridwan Dibya Sudartha, S.E., M. T.
NIP. 19740220 200112 1 005

LAMPIRAN 2

BA KESEPAKATAN CAPAIAN OUTPUT



BERITA ACARA KESEPAKATAN

CAPAIAN *OUTPUT* BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA TAHUN 2023

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (29-12-2023) telah ditetapkan Capaian Hasil Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya TA 2023 pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II dengan hasil sebagai berikut:

NO	BALAI/SATKER	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	CAPAIAN KINERJA
	BALAI P2P PAPUA II	1.425	1.425	100,00%
1	Satker PP Provinsi Papua Barat	1.425	1.425	100,00%

Demikian Capaian *Output* Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya Tahun 2023 telah dibuat berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II Tahun 2023, sehingga Berita Acara Kesepakatan ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Rumah Swadaya Tahun 2023.

Manokwari, 29 Desember 2023

Disetujui oleh:

Kepala Balai P2P Papua II



Ridwan Dibia Sudartha, S.E., M.T.
NIP. 197402202001121005



BERITA ACARA KESEPAKATAN

CAPAIAN *OUTPUT* PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN TAHUN 2023

Rapat : Konsolidasi Pengendalian Langkah-langkah Akhir Tahun dan Harmonisasi Capaian *Output* Pembangunan Rumah Susun Tahun 2023

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Desember 2023

Pimpinan : Direktur Rumah Susun

Peserta : 1. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
2. Para Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan
3. Para Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun

Pada hari **Jumat** tanggal **Lima belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (15-12-2023) melalui *Video Conference*, telah dilaksanakan Rapat Konsolidasi Pengendalian Langkah-langkah Akhir Tahun dan Harmonisasi Capaian *Output* Pembangunan Rumah Susun Tahun 2023 dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

NO	BALAI/SATKER	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	CAPAIAN KINERJA
1	BALAI P2P PAPUA II	43	43	100,00 %
	- Satker PP Provinsi Papua Barat	43	43	100,00 %

Demikian Capaian *Output* Pembangunan Rumah Susun Tahun 2023 ini telah dibuat berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja **Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II** Tahun 2023, sehingga Berita Acara Kesepakatan ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Rumah Susun Tahun 2023

Manokwari, 29 Desember 2023

Disetujui oleh,
Kepala Balai P2P Papua II


Ridwan Dibia Sudartha, S.E., M.T.
NIP. 197402202001121005



BERITA ACARA KESEPAKATAN

CAPAIAN *OUTPUT* PEMELIHARAAN RUMAH SUSUN TAHUN 2023

Rapat : Konsolidasi Pengendalian Langkah-langkah Akhir Tahun dan Harmonisasi Capaian *Output* Pembangunan Rumah Susun Tahun 2023

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Desember 2023

Pimpinan : Direktur Rumah Susun

Peserta : 1. Para Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
2. Para Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan
3. Para Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun

Pada hari **Jumat** tanggal **Lima belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (15-12-2023) melalui *Video Conference*, telah dilaksanakan Rapat Konsolidasi Pengendalian Langkah-langkah Akhir Tahun dan Harmonisasi Capaian *Output* Pembangunan Rumah Susun Tahun 2023, dengan hasil kesepakatan *Output* Pemeliharaan Rumah Susun sebagai berikut:

NO	BALAI/SATKER	TARGET (Tower)	REALISASI (Tower)	CAPAIAN KINERJA
1	BALAI P2P PAPUA II	3	3	100,00 %
	- Satker PP Provinsi Papua Barat	3	3	100,00 %

Demikian Capaian *Output* Pemeliharaan Rumah Susun Tahun 2023 ini telah dibuat berdasarkan Revisi Akhir Perjanjian Kinerja **Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II** Tahun 2023, sehingga Berita Acara Kesepakatan ini dapat digunakan sebagai bukti dukung dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Rumah Susun Tahun 2023

Manokwari, 29 Desember 2023

Disetujui oleh,

Kepala Balai P2P
Papua II



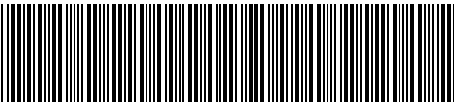
Ridwan Dibia Sudartha, S.E., M.T.

NIP. 197402202001121005

LAMPIRAN 3

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)





**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 033.07.1.420161/2023**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

Revisi ke 10
Tanggal : 27 Desember 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- 2. Unit Organisasi : (07) Ditjen Perumahan
- 3. Provinsi : (33) PAPUA BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
- Sebesar : Rp. 7.601.631.000 (TUJUH MILIAR ENAM RATUS SATU JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir
Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	7.601.631.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN MANOKWARI (065) Rp. 7.601.631.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

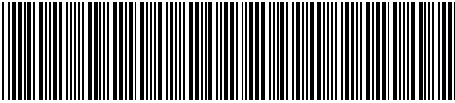
ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2023



DS:5300-5902-1386-7456

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

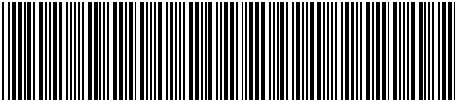
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	7.601.631.000
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	3.688.175.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	3.913.456.000

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2023

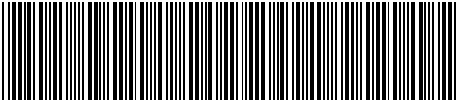


DS:5300-5902-1386-7456

Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	3.913.456.000
IA.4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	Rp.	3.913.456.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	3.688.175.000
WA.5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	Rp.	3.688.175.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2023
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5300-5902-1386-7456

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (07) Ditjen Perumahan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

Halaman : I A. 1

Program	:	033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				3.913.456.000
Kegiatan	:	4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni				3.913.456.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Ketersediaan Rumah Layak dan Aman				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana			6,00 Rekomendasi Kebijakan, Kajian 3.913.456.000
Rincian Output	:	01	ABF.009	Strategi dan Program Prioritas Tahunan Bidang Perumahan			1.00 Rekomendasi Kebijakan 1.771.896.000
		02	ABF.011	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Swadaya			1.00 Rekomendasi Kebijakan 151.000.000
		03	ABF.015	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Susun			1.00 Rekomendasi Kebijakan 1.150.000.000
		04	ABF.016	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Khusus			1.00 Rekomendasi Kebijakan 110.000.000
		05	ABF.021	Penyusunan Program dan Anggaran Penyelenggaraan Rumah Umum dan Komersial			1.00 Rekomendasi Kebijakan 475.500.000
		06	ABF.024	Penyusunan Kebijakan Teknis, Pembinaan Teknis, serta Kerangka Kerja Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko Bidang Perumahan			1.00 Rekomendasi Kebijakan 255.060.000
Program	:	033.07.WA	Program Dukungan Manajemen				3.688.175.000
Kegiatan	:	5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan				3.688.175.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Presentase efektivitas dan efisiensi tata kelola penyelenggaraan perumahan				
Klasifikasi Rincian Output	1	:	5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			2,00 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit 3.027.175.000
Rincian Output	:	01	EBA.962	Layanan Umum			1.00 Layanan 331.000.000
		02	EBA.994	Layanan Perkantoran			1.00 Layanan 2.696.175.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			1,00 Unit, m2, Paket 661.000.000
Rincian Output	:	01	EBB.951	Layanan Sarana Internal			1.00 Unit 661.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2023
I A. INFORMASI KINERJA



DS:5300-5902-1386-7456

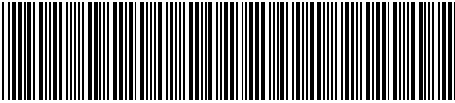
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (07) Ditjen Perumahan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

Halaman : I A. 2

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2023



DS:5300-5902-1386-7456

I B. SUMBER DANA

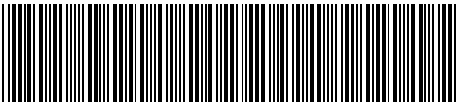
Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (07) Ditjen Perumahan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	7.601.631.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	7.601.631.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:5300-5902-1386-7456

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (07) Ditjen Perumahan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II
Kewenangan : (KP)

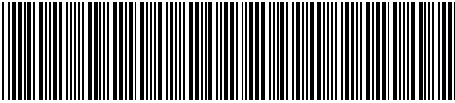
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
420161	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II	-	6.940.631	661.000	-	-	7.601.631	33 . 00	
033.07.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	3.913.456	-	-	-	3.913.456		
4978	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	-	3.913.456	-	-	-	3.913.456		
4978.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	3.913.456	-	-	-	3.913.456		
01	RM	-	3.913.456	-	-	-	3.913.456		
033.07.WA	Program Dukungan Manajemen	-	3.027.175	661.000	-	-	3.688.175		
5578	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	-	3.027.175	661.000	-	-	3.688.175		
5578.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	3.027.175	-	-	-	3.027.175		
01	RM	-	3.027.175	-	-	-	3.027.175		
5578.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (33.00 PAPUA BARAT / PAPUA BARAT)	-	-	661.000	-	-	661.000		
01	RM	-	-	661.000	-	-	661.000	065	
JUMLAH		-	6.940.631	661.000	-	-	7.601.631		

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:5300-5902-1386-7456

Kementerian Negara/Lembaga : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : (07) Ditjen Perumahan
Provinsi : (33) PAPUA BARAT
Kode>Nama Satker : (420161) BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

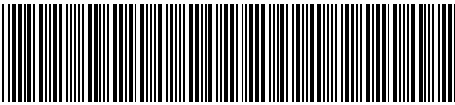
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	420161	BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	433.739	253.322	364.731	432.952	356.058	892.957	312.492	348.672	1.007.096	1.959.602	1.240.012	7.601.631
		BELANJA BARANG	0	433.739	253.322	364.731	432.952	356.058	892.957	312.492	348.672	907.816	1.598.602	1.039.292	6.940.631
		BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.280	361.000	200.720	661.000
		033.07.IA.4978 Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	0	86.387	114.999	60.174	242.170	190.114	536.005	207.021	214.422	451.105	1.202.310	608.749	3.913.456
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	86.387	114.999	60.174	242.170	190.114	536.005	207.021	214.422	451.105	1.202.310	608.749	3.913.456
		033.07.WA.5578 Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan	0	347.352	138.322	304.557	190.782	165.944	356.952	105.470	134.250	555.991	757.291	631.264	3.688.175
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	347.352	138.322	304.557	190.782	165.944	356.952	105.470	134.250	456.711	396.291	430.544	3.027.175
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99.280	361.000	200.720	661.000

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2023
IV A. B L O K I R



DS:5300-5902-1386-7456

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [07] Ditjen Perumahan
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [420161] BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

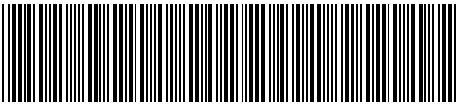
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 033.07.1.420161/2023
IV B. C A T A T A N



DS:5300-5902-1386-7456

Kementerian Negara/Lembaga : [033] KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Unit Organisasi : [07] Ditjen Perumahan
Provinsi : [33] PAPUA BARAT
Kode dan Nama Satker : [420161] BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN PAPUA II

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL

ttd.
Mohammad Zainal Fatah
NIP 196610211996031001

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI KEGIATAN



Dokumentasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya



Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

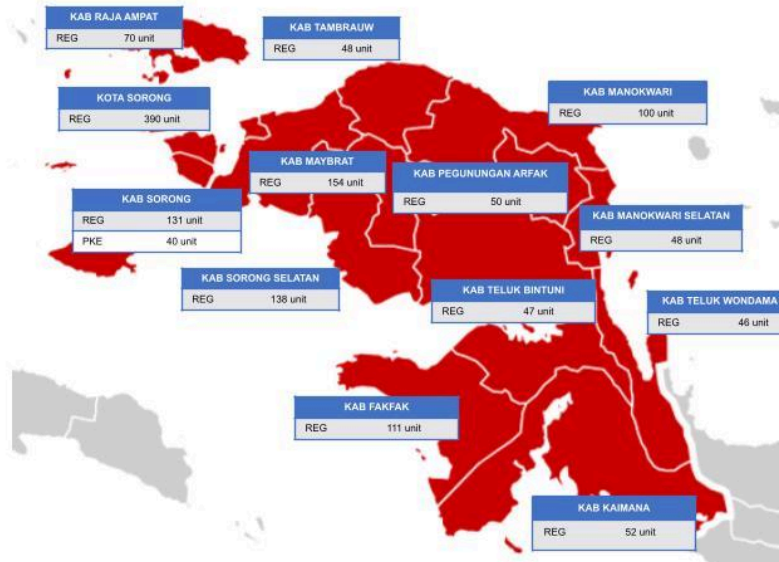
TOTAL SK DIRJEN
1425 UNIT

BSPS REGULER
1385 UNIT

BSPS PKE
40 UNIT

Progres Fisik
100%

Progres Keuangan
99,77%



DOKUMENTASI PELAKSANAAN BSPS PROVINSI PAPUA BARAT



0%



30%



100%

Nama PB/No BNBA	Dolfinus Sagisolo
Desa/Kelurahan	Sasnek
Kecamatan	Sawiat
Kabupaten/Kota	Sorong Selatan
Besaran Bantuan	Rp. 40.000.000
Besaran Swadaya	
Jenis Kegiatan	Reguler

DOKUMENTASI PELAKSANAAN BSPTS PROVINSI PAPUA BARAT



0%



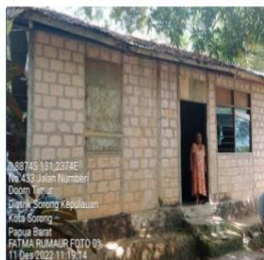
30%



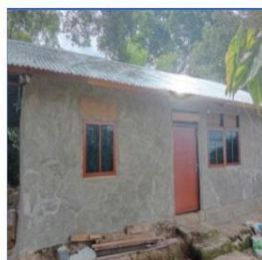
100%

Nama PB/No BNBA	SARFA KINDER
Desa/Kelurahan	TOMU
Kecamatan	TOMU
Kabupaten/Kota	TEL.BINTUNI
Besaran Bantuan	Rp. 40.000.000
Besaran Swadaya	
Jenis Kegiatan	Reguler

DOKUMENTASI PELAKSANAAN BSPTS PROVINSI PAPUA BARAT



0%



30%



100%

Nama PB/No BNBA	
Desa/Kelurahan	Dum Timur
Kecamatan	Sorong Kepulauan
Kabupaten/Kota	Kota Sorong
Besaran Bantuan	40.000.000
Besaran Swadaya	1.000.000
Jenis Kegiatan	Reguler

BSPS PKE KOLABORASI BAZNAS KAB. SORONG



Sosialisasi dan Pembentukan KPB



Sosialisasi dan Pembentukan KPB



Penandatanganan Buku Tabungan



Sosialisasi dan Pembentukan KPB

BSPS PKE KOLABORASI BAZNAS KAB. SORONG



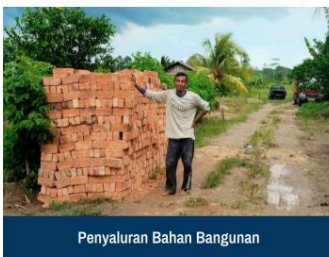
Penyerahan Simbolis Bahan Bangunan



Penyaluran Bahan Bangunan



Proses Konstruksi



Penyaluran Bahan Bangunan



Penyaluran Bahan Bangunan



Proses Konstruksi

PENANGANAN KAWASAN PERUMAHAN TERPADU TAMPAGARAM, KOTA SORONG

Menara Air



Bantuan Cat Rumah



PENANGANAN KAWASAN PERUMAHAN TERPADU TAMPAGARAM, KOTA SORONG

PSU Rumah Swadaya



100 %

PROGRES KEUANGAN

Status: 14 Desember 2023

Dokumentasi Rumah Susun



Rusun Universitas Muhammadiyah Sorong



Alamat	Jl. Sorong - Aimas (KM 15), Klabilim, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat
Tower	1 Tower
Tipe	T 24 Pendek / 3 lantai
Unit	43 Unit
Kontraktor	PT. Pubagot Jaya Abadi Tanggal Kontrak : 3 November 2022 Nilai Kontrak : Rp 13.965.504.000,00
MK	PT. SARANABUDI PRAKARSARIPTA KSO PT. SOLID KONSULTAN Tanggal Kontrak : 3 November 2022 Nilai Kontrak : Rp 936.704.000,00

Progres Keuangan
100%

Progres Fisik
100%



Pemeliharaan dan Perawatan Rusun TNI AL Sorong



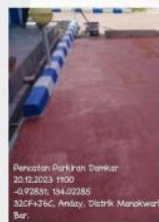
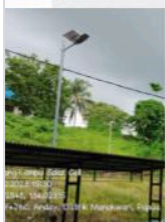
Alamat	Jl. Sorong-Aimas KM 16, Kel. Klabilim, Sorong Timur, Kota Sorong
Tower	1 Tower
Tipe	T 36 / 3 lantai
Unit	43 Unit
Kontraktor	CV. MITRA PAPUA Tanggal Kontrak : 7 November 2023 Nilai Kontrak : Rp 642.395.000,-
MK	CV. TIGA PERSPECTIVE ENGINEERING Tanggal Kontrak : 7 November 2023 Nilai Kontrak : Rp 61.255.000,-

Progres Keuangan
100%

Progres Fisik
100%



Pemeeliharaan dan Perawaran Rusun GPdI Alkitab



Alamat	Jl. Trikora No. 11, Kel. Anday, Kec. Manokwari Selatan, Kab. Manokwari
Tower	1 Tower
Tipe	T 24 Pendek / 3 Lantai
Unit	43 Unit
Kontraktor	CV. Bungsu Jaya Konstruksi Tanggal Kontrak : 7 November 2023 Nilai Kontrak : Rp. 721.016.000,-
MK	CV. Idea Konsultan Tanggal Kontrak : 7 November 2023 Nilai Kontrak : Rp. 67.599.000,-

Progres Keuangan
100%

Progres Fisik
100%



Pemeeliharaan dan Perawaran Rusun Hidayatullah



Alamat	Jl. Trikora km.19 Kel. Andai Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari Papua barat
Tower	1 Tower
Tipe	Barak Supermini / 2 Lantai
Unit	14 Unit
Kontraktor	CV. ITA WOTU NUSA Tanggal Kontrak : 24 Mei 2023 Nilai Kontrak : Rp 795.690.000,-
MK	CV. BATARA KONSULTAN Tanggal Kontrak : 24 Mei 2023 Nilai Kontrak : Rp 106.000.000,-

Progres Keuangan
100%

Progres Fisik
100%

Dokumentasi Rumah MBR yang mendapat Fasilitas layanan Bantuan PSU



Bantuan PSU Perumahan Green Valley Residence



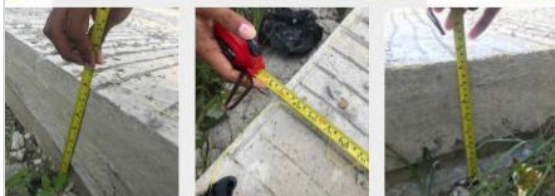
Alamat	Jl. Trikora Wosi, Wosi, Kec. Manokwari Bar., Kabupaten Manokwari, Papua Bar. 98312
Unit	120
Tipe	Jalan Beton
Panjang, lebar	Panjang jalan 420 m, Lebar 4 m
Kontrak	1. Tanggal Kontrak 30 Maret 2023 2. Nilai Kontrak Rp 995.841.000,00 3. Masa Pelaksanaan SPMK 150 Hari Kalender (3 April s.d 30 Agustus 2023)

Progres Keuangan
100%

Progres Fisik
100%



Bantuan PSU Perumahan Sogun Permai 5



Alamat	Anday, Manokwari Selatan, Manokwari Regency, West Papua 98315
Unit	51
Tipe	Jalan Beton
Panjang, lebar	Panjang Jalan 204 m, Lebar 4 m
Kontrak	1. Tanggal Kontrak 8 September 2023 2. Nilai Kontrak Rp 471.240.000,00 3. Masa Pelaksanaan SPMK 90 Hari Kalender (8 September s.d 06 Desember 2023)

Progres Keuangan
100%

Progres Fisik
100%



Bantuan PSU Perumahan Arfai Salak



Alamat	Jl. Drs Esau Sesa, Sowi, Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari, Papua Bar. 98315
Unit	73
Tipe	Jalan Beton
Panjang, lebar	Panjang Jalan 255,5 m Lebar 4 m
Kontrak	1. Tanggal Kontrak 31 Juli 2023 2. Nilai Kontrak Rp 600.803.000,00 3. Masa Pelaksanaan SPMK 90 Hari Kalender (31 Juli s.d 28 Oktober 2023)

Progres Keuangan
100%

Progres Fisik
100%